

**PENGEMBANGAN MODEL MANAJEMEN RISIKO DI ERA DIGITAL  
DALAM Mendukung SISTEM PENGENDALIAN INTERN  
PEMERINTAH (SPIP)  
(STUDI KASUS INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN  
UTARA)**

**TESIS**



Disusun Oleh

Nama : Annisa Fitriani

Nim : 23919005

**PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI  
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA**

2025

Pengembangan Model Manajemen Risiko di Era Digital  
Dalam Mendukung Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)  
(Studi Kasus Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Utara)

**TESIS**

Disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagai salah satu syarat untuk mencapai  
Pasca Sarjana Strata-2 Program Studi Akuntansi pada Fakultas Bisnis dan  
Ekonomika UII

Disusun Oleh

Nama : Annisa Fitriani

Nim : 23919005

PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI

FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2025

## BERITA ACARA UJIAN TESIS

Pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2025 Program Studi Akuntansi Program Magister, Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia telah mengadakan ujian tesis yang disusun oleh :

**ANNISA FITRIANI**

No. Mhs. : 23919005

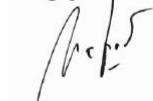
Konsentrasi : Audit Forensik

Dengan Judul:

**PENGEMBANGAN MODEL MANAJEMEN RISIKO DI ERA DIGITAL DALAM  
MENDUKUNG SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)**

Berdasarkan penilaian yang diberikan oleh Tim Penguji,  
maka tesis tersebut dinyatakan **LULUS**

Penguji I



Dr. Mahmudi, S.E., M.Si.

Penguji II



Hendi Yogi Prabowo, S.E., MforAcc., Ph.D.

Mengetahui

Ketua Program Studi,



Arief Rahman, S.E., S.I.P., M.Com., Ph.D.

**HALAMAN PENGESAHAN**



Yogyakarta, 2 Mei 2025

Telah diterima dan disetujui dengan baik oleh :

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read "M. Mahmudi", is placed below the text "Dosen Pembimbing".

Dr. Mahmudi, S.E., M.Si.

## PERNYATAAN PLAGIARISME

### PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi ini. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.”

Yogyakarta, 23 Mei 2025



**HALAMAN PENGESAHAN**

**PENGEMBANGAN MODEL MANAJEMEN RISIKO DI ERA DIGITAL  
DALAM Mendukung SISTEM PENGENDALIAN INTERN  
PEMERINTAH (SPIP)**

**(STUDI KASUS INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI  
KALIMANTAN UTARA)**

**TESIS**

Oleh:

Nama : Annisa Fitriani

No. Mahasiswa : 23919005

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada tanggal, 19 Mei 2025

Dosen Pembimbing,



(Dr Mahmudi S.E., M.Si)

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Sesungguhnya Bersama kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan lain).”

(QS. Al-Insyirah : 6-7)

“Pendidikan merupakan senjata paling ampuh yang bisa kamu gunakan untuk merubah dunia.”

(Nelson Mandela)

KUPERSEMBAHKAN TESIS INI UNTUK....

Diri saya sendiri yang sudah berjuang dan bersemangat untuk menyelesaikan tugas akhir ini demi melihat orang tersayang bangga.

Kedua orang tua saya abah dan mama yang sampai sekarang tidak pernah keberatan untuk memberikan doa restu, dukungan dan semangat saat masa perkuliahan.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr. Wb., Alhamdulillahirobbil'alamin. Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya serta nikmat iman dan islam kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini tepat pada waktunya. Shalawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan alam Rasulullah Muhammad SAW yang telah menuntun umatnya dari zaman jahiliyah menuju jalan yang kaya akan ilmu pengetahuan seperti saat ini.

Tesis yang berjudul **“Pengembangan Model Manajemen Risiko di Era Digital Dalam Mendukung Sistem Pengendalian Intern Pemerintah”** ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan program pascasarjana Program Studi Akuntansi pada Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.

Penyusunan tesis ini dalam prosesnya tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Allah SWT, yang selalu memberi kekuatan, kemudahan, kelancaran, serta ridho dan kasih sayang tiada tara pada seluruh hamba-Nya.
2. Kedua orang tua penulis, Abah saya Ibramsyah dan Mama saya Kamsiah Bakrie yang selalu memberikan perhatian, dukungan, do'a, dan kasih sayangnya hingga nanti.
3. Ravi'i Ramadhan dan Ilham Maulana selaku kakak serta Reyhan Iswardan selaku adik penulis yang telah memberikan motivasi, dukungan, dan arahnya sehingga penulis memiliki motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Teruntuk Muhammad Albi Rusliansyah yang selalu memberikan semangat dan motivasi selama kuliah, serta selalu menemani saat suka dan duka membuat tesis ini,

5. Keluarga besar Albi yang selalu menyemangati dan memberikan dukungan kepada saya.
6. Bapak Fathul Wahid, ST., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia periode 2022-2026, dan seluruh jajaran pemimpin universitas.
7. Bapak Arief Rahman, S.E., S.I.P., M.Com., Ph.D. selaku ketua Ketua Program Studi Akuntansi Program Magister Universitas Islam Indonesia.
8. Bapak Dr Mahmudi S.E., M.Si. selaku dosen pembimbing tesis, terimakasih atas waktu, nasehat, kritik, saran, serta arahan yang telah diberikan kepada penulis selama proses penyusunan tesis.
9. Sahabat penulis dari SMP hingga sekarang yang sudah seperti keluarga, Azizah Bansir, Ridha Aulia dan Dewi Kurnia Putri.
10. Sahabat penulis dari SMA hingga sekarang yang sudah seperti keluarga, Atiqah Nurul, Yuniza Aura dan Salsabila Rana.
11. Teman-teman dimasa awal perkuliahan hingga sekarang, Apsarini Khairunisa, Tinara Zaphira, dan Putri Intan.
12. Teman-teman Jurusan Akuntansi angkatan 2023 khususnya teman-teman yang telah menjadi teman sekaligus keluarga yang baik sejak awal penulis memasuki bangku kuliah.

Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya untuk semua kebaikan, bantuan, serta dukungan dari pihak tersebut. Penulis berharap supaya tesis ini bisa memberikan manfaat serta pengetahuan bagi banyak pihak.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 23 Mei 2025

Penulis,

Annisa Fitriani

## DAFTAR ISI

JUDUL TESIS.....	ii
PERNYATAAN PLAGIARISME .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI .....	viii
DAFTAR GAMBAR .....	x
DAFTAR TABEL .....	xi
ABSTRAK .....	xii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian .....	6
1.4 Manfaat Penelitian .....	6
1.5 Sistematika Penulisan .....	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA .....	9
2.1 Landasan Teori .....	9
2.2 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).....	13
2.3 Penelitian Terdahulu .....	15
BAB III METODE PENELITIAN .....	21
3.1 Jenis Penelitian .....	21
3.2 Objek Penelitian .....	22
3.3 Instrumen Penulisan.....	22
3.4 Bagan Alur Penelitian .....	22
3.5 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data.....	24
3.6 Analisis Data .....	26
3.7 Uji Keabsahan Data .....	28
BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN .....	30
4.1 Profil Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Utara .....	30
4.2 Pengembangan Model Manajemen Risiko Berbasis Digital dalam Mendukung SPIP .....	35

4.3 Implementasi Model Manajemen Risiko Digital di Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Utara .....	42
4.4 Indikator Kunci Manajemen Risiko dalam Mendukung Sistem Pengendalian Intern Pemerintah .....	48
BAB V PENUTUP .....	55
5.1 Kesimpulan Penelitian .....	55
5.2 Keterbatasan Penelitian .....	57
5.3 Saran Penelitian .....	58
DAFTAR PUSTAKA .....	59
DAFTAR LAMPIRAN.....	61

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Sistematika Penelitian.....	23
Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Umum .....	32
Gambar 4. 2 Struktur Organisasi Inspektorat Daerah.....	32
Gambar 4. 3 Skema Pengembangan Model Manajemen Risiko .....	35
Gambar 4. 4 Model Manajemen Risiko .....	39
Gambar 4. 5 Strategi Impementasi SDM .....	44
Gambar 4. 6 Proses Identifikasi Risiko.....	50

## DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu.....	18
Tabel 4. 1 Kode Digitalisasi Manajemen Risiko .....	38
Tabel 4. 2 Kode Strategi Implementasi Persiapan SDM .....	42
Tabel 4. 3 Kode Identifikasi dan Analisis Risiko .....	49

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keterangan Penelitian .....	62
Lampiran 2 Transkrip Wawancara 1 .....	63
Lampiran 3 Transkrip Wawancara 2 .....	68
Lampiran 4 Transkrip Wawancara 3 .....	71
Lampiran 5 Transkrip Wawancara 4 .....	75
Lampiran 6 Transkrip Wawancara 5 .....	79
Lampiran 7 Dokumentasi Wawancara .....	82

## ABSTRAK

Transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan menjadi kebutuhan mendesak untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi, khususnya dalam implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model manajemen risiko berbasis digital melalui studi kasus pada Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, dan dokumentasi yang dianalisis menggunakan perangkat lunak NVivo. Penelitian ini menemukan bahwa aplikasi MARISKA, sebagai hasil dari pengembangan model manajemen risiko berbasis digital di Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Utara, berhasil mengatasi kendala utama sistem manual, seperti duplikasi data, lemahnya monitoring, dan ketidakefisienan dokumentasi. Temuan utama menunjukkan bahwa sistem MARISKA terintegrasi dengan dokumen strategis seperti RENSTRA dan memungkinkan pelaporan risiko yang lebih sistematis serta peningkatan nilai maturitas SPIP. Penelitian juga menemukan bahwa indikator risiko dalam aplikasi telah dirancang sesuai dengan konteks tujuan strategis OPD, mempermudah evaluasi kinerja yang berkelanjutan. Meskipun sistem ini memberikan banyak manfaat, penelitian mengidentifikasi tantangan utama berupa ketidaksiapan SDM dan keterbatasan infrastruktur TIK dalam proses adopsinya.

**Kata Kunci:** Manajemen Risiko, SPIP, Digitalisasi, Pemerintah Daerah, MARISKA, Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Utara

## ABSTRACT

*Digital transformation in public governance has become an urgent necessity to enhance transparency, accountability, and efficiency, particularly in the implementation of the Government Internal Control System (SPIP). This study aims to develop a digital-based risk management model through a case study at the Regional Inspectorate of North Kalimantan Province. A descriptive qualitative approach was used, with data collected through in-depth interviews, documentation, and observation, then analyzed using NVivo software. This study found that the MARISKA application, developed as a digital risk management model at the Regional Inspectorate of North Kalimantan Province, effectively addressed the main limitations of the previous manual system, such as data duplication, weak monitoring, and inefficient documentation. Key findings reveal that MARISKA is integrated with strategic documents like RENSTRA and has enhanced systematic risk reporting and improved SPIP maturity scores. The study also discovered that the risk indicators embedded in the system align with the strategic goals of government agencies, enabling more objective and sustainable performance evaluations. Despite these benefits, the study identified challenges in human resource readiness and ICT infrastructure that hinder the system's full adoption.*

**Keywords:** Risk Management, SPIP, Digitalization, Local Government, MARISKA, Inspectorate, Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pemerintahan sering berhadapan dengan tantangan yang kompleks dalam menerapkan good governance di Indonesia, terutama pada penerapan manajemen risiko yang beragam karakteristik unit sektor publik. Sehingga dalam mengatasi tantangan – tantangan tersebut, perlu fokus pada peningkatan kapabilitas internal, penerapan teknologi yang mendukung, serta membangun budaya yang lebih responsive terhadap risiko (Irianto dan Amirya, 2024).

Organisasi menghadapi risiko dalam usaha mencapai tujuannya. Pengelolaan risiko berperan dalam membantu organisasi menangani beragam potensi bahaya yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan tersebut. Di Kementerian Keuangan, penerapan dan pengelolaan risiko diatur berdasarkan ketentuan yang tertua dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.09/2008 mengenai Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Departemen Keuangan. pelaksanaan risiko manajemen merupakan tugas unit eselon II yang berlokasi di Kantor Pusat dan Kantor Vertikal. Misalnya, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) sudah berhasil menerapkan manajemen risiko secara bertahap sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan tersebut. Kerja sama dengan Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemenkeu sebagai Compliance Office for Risk Management (CORM) dilakukan, di mana Itjen Kemenkeu berperan sebagai pembimbing dan konsultan dalam implementasi manajemen risiko (Kementrian Keuangan RI, 2015).

Dalam konteks tersebut, penting bagi pemerintah Indonesia untuk mengimplementasikan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang efektif dan andal. Salah satu unsur kunci dalam SPIP adalah manajemen risiko. Manajemen risiko adalah pendekatan terstruktur untuk mengelola ketidakpastian yang berhubungan dengan berbagai tindakan yang dilakukan manusia, termasuk mengidentifikasi bahaya dan menyusun strategi mitigasi risiko, dan mitigasi risiko lewat pengelolaan sumber daya. Langkah-langkah yang bisa diambil mencakup pengembangan manajemen risiko instansi dengan cara meminimalisir risiko, memitigasi konsekuensi buruk dari risiko, atau mengakomodasi seluruh maupun sebagian dampak yang mungkin timbul dari suatu risiko. Manajemen risiko mempunyai tujuan yakni mengurangi berbagai risiko yang berkaitan dengan pencapaian sasaran program dan kegiatan organisasi (Suriyadi dan Azmi, 2022).

Pentingnya manajemen risiko dan pengendalian internal terletak pada kemampuan untuk mengidentifikasi potensi risiko sejak dini. Kementerian Keuangan telah menjalankan manajemen risiko dan pengendalian internal sejak tahun 2016, dan regulasinya pun telah disempurnakan beberapa kali. Saat ini, peraturan yang berlaku Merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 105 Tahun 2022 tentang Manajemen Risiko Pengelolaan Keuangan Negara dan PMK Nomor 477 Tahun 2021 yang mengatur Pedoman Pemantauan Sistem Pengendalian Intern di Kementerian Keuangan. Manajemen risiko di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) diatur melalui Petunjuk Teknis Pelaksanaan Manajemen Risiko Pengelolaan Keuangan Negara, yang ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 252 Tahun 2022. Pentingnya mempunyai manajemen risiko dan pengendalian internal yang efektif

dapat mendukung pencapaian sasaran dan kinerja, meningkatkan tata kelola dan kepatuhan, dan mempunyai kemampuan untuk meminimalkan ancaman yang mungkin menghambat organisasi sasaran (Kementrian Keuangan RI, 2023).

Oleh karena itu, Pada masa era digital berbagai ranah kehidupan telah mengalami transformasi mendalam akibat pesatnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, salah satunya tata kelola pemerintahan. Termasuk aspek penting yang harus dikembangkan dalam Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah manajemen risiko. Pengembangan manajemen risiko di era digital tidak hanya mendukung good governance, tetapi juga memastikan bahwa pemerintah dapat beroperasi dengan efisien, efektif, transparan, dan akuntabel dalam menghadapi tantangan modern. Pemerintah yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan mampu mengelola risiko dengan baik akan selalu siap sedia menghadapi beragam rintangan yang akan datang serta berkomitmen untuk menyajikan pelayanan yang optimal bagi masyarakat (Farmanta, 2022).

Saat ini Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Utara telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam menjalankan fungsi pengawasan dengan memperkuat pengembangan manajemen risiko untuk Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Melalui langkah-langkah strategis, Inspektorat telah memastikan bahwa seluruh proses pengawasan berjalan efektif dan efisien (Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, 2020).

Pengembangan manajemen risiko yang dilakukan meliputi pengenalan, penilaian, serta mitigasi risiko yang bisa menghambat pencapaian tujuan organisasi. Inspektorat secara proaktif mengidentifikasi potensi risiko di berbagai aspek operasional, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program dan

kegiatan pemerintah. Selain itu, Inspektorat juga telah melaksanakan pelatihan dan sosialisasi kepada seluruh pegawai tentang pentingnya manajemen risiko dalam SPIP. Hal ini bertujuan agar pemahaman dan kesadaran akan pentingnya pengelolaan risiko semakin mendalam yang baik dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, serta akuntabel. Melalui upaya-upaya tersebut, Inspektorat telah berhasil menciptakan lingkungan pengendalian dengan membuat aplikasi manajemen risiko untuk Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara yang lebih kokoh dan bisa diandalkan, sehingga mendukung terciptanya manajemen risiko yang lebih baik serta peningkatan kualitas kinerja pemerintah secara keseluruhan (Bappeda Litbang Kalimantan Utara, 2024).

Upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berdaya, berhasil, terbuka, dan bertanggung jawab, pimpinan unit organisasi penting untuk melakukan kontrol terhadap seluruh kegiatan pemerintahan. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang mencakup dan mengendalikan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), yang telah ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008. Untuk mencapai hal tersebut maka penerapan aplikasi Manajemen Risiko sebagai alat agar sasaran organisasi tercapai, diperlukan pelaksanaan kegiatan yang dijalankan secara efisien dan efektif, pelaporan keuangan yang akurat, perlindungan aset negara, dan kepatuhan terhadap peraturan hukum merupakan aspek penting sangat diperlukan (Jonathan dan Fahrur, 2023)

Sejumlah studi yang melakukan penelitian dengan isu yang relevan dengan penelitian yang akan dilaksanakan. Penelitian (Azmi dan Suryadi, 2022) yang dijadikan acuan penelitian ini membahas Pengembangan Manajemen Risiko Pada

Instansi Pendidikan dengan indikator penetapan konteks, penilaian risiko dan penanganan risiko. Serta penelitian (Mawikere et al, 2022) dengan tujuan meninjau pelaksanaan sistem pengendalian internal pemerintah di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, serta membandingkan kesesuaiannya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008.

Berdasarkan pada penelitian terdahulu yang sudah dicantumkan sebagai penelitian acuan, sebagian besar penelitian berfokus pada indikator manajemen risiko yang ada sehingga hanya melakukan analisis sesuai dengan indikator manajemen risiko. Sehingga novelty yang dikembangkan dari penelitian ini ialah Pengembangan manajemen risiko yang digunakan dalam penilaian SPIP dengan indikator penelitian berupa aplikasi yang dibuat oleh Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Utara dan indikator penelitian dari unsur manajemen risiko. Penelitian yang akan diadakan oleh para peneliti ini mengangkat judul **“Pengembangan Model Manajemen Risiko di Era Digital Dalam Mendukung Sistem Pengendalian Intern Pemerintah”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah yang sudah dipaparkan, maka peneliti merumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pengembangan model manajemen risiko yang efektif di era digital membantu Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Utara dalam mendukung sistem pengendalian intern Pemerintah?

2. Apakah implementasi model manajemen risiko di era digital membantu Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Utara dalam mendukung sistem pengendalian intern pemerintah?
3. Bagaimana indikator utama dalam manajemen risiko dalam mendukung sistem pengendalian intern pemerintah di Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Utara?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan identifikasi diatas yang sudah dipaparkan, maka peneliti merumuskan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Mengetahui pengembangan model manajemen risiko yang efektif membantu Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Utara dalam mendukung sistem pengendalian intern Pemerintah
2. Mengetahui implementasi model manajemen risiko di era digital membantu Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Utara dalam mendukung sistem pengendalian intern pemerintah
3. Mengetahui dan menganalisis indikator utama dalam manajemen risiko dalam mendukung sistem pengendalian intern pemerintah di Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Utara

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai berikut:

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Penelitian ini harapannya dapat memperluas wawasan melalui penyajian komprehensif terkait Pengembangan Model Manajemen Risiko Dalam Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Era Digital guna membentuk pemerintahan yang

bersih dan lebih baik. Bagi akademisi kiranya akan dapat memberi Pengembangan Model Manajemen Risiko Dalam Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Era Digital serta berkontribusi dalam pengembangan serta implementasi ilmu pengetahuan dan menjadi literatur untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

#### 1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini harapannya bisa berkontribusi dalam memaparkan informasi terkait beberapa faktor yang memengaruhi implementasi manajemen risiko dalam sistem pengendalian intern pemerintah yang lebih baik demi tercapainya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah yang baik, bersih, efisien, dan efektif. Informasi yang diperoleh dari penelitian ini dapat menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara dalam merumuskan kebijakan untuk mengoptimalkan maturitas sistem pengendalian intern pemerintah.

### 1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini dijelaskan sebagai berikut:

#### **BAB I       Pendahuluan**

Bab ini membahas secara rinci mengenai: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

#### **BAB II       Kajian Pustaka**

Bab ini menguraikan teori-teori yang relevan serta penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini.

#### **BAB III      Metodologi Penelitian**

Dalam bab ini terdiri dari populasi dan sampel penelitian, metode pengambilan sampel, metode pengambilan data, definisi operasional variabel dan metode analisis data.

**BAB IV Hasil Tes dan Analisis data**

Bab ini menyajikan hasil penelitian dan analisis secara rinci, beserta tahapan pengolahan data yang telah dilaksanakan.

**BAB V Kesimpulan, Implikasi dan Saran**

Bagian ini memuat kesimpulan penelitian, memaksakannya, serta rekomendasi untuk penelitian di masa mendatang.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### 2.1 Landasan Teori

##### 2.1.1 Teori *Good Governance*

Konsep tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dapat dikatakan dihilangkan dari kekhawatiran sebagian masyarakat akan potensi mencakup kewenangan oleh pejabat negara atau aparatur administrasi negara. Adanya keleluasaan bertindak (*freies ermessen*) pada pejabat tersebut merugikan dapat merugikan warga negara, sehingga memunculkan gagasan yang menekan pada prinsip-prinsip pemerintahan umum yang baik. Tata kelola pemerintahan yang baik Merujuk pada pengelolaan pembangunan yang kokoh dan akuntabel. Pendekatan ini selaras dengan prinsip-prinsip demokrasi dan efisiensi pasar. Di dalamnya terkandung upaya menghindari membatasi alokasi dana investasi dan mencegah korupsi, baik dalam ranah politik maupun administrasi. Selain itu, aspek ini juga mencakup penerapan disiplin anggaran dan pembentukan kerangka hukum serta politik yang mendukung perkembangan aktivitas usaha. Secara ringkas, *good governance* pemerintahan yang baik secara umum diartikan sebagai pengelolaan pemerintahan yang efektif (Arianto, 2006).

Pemberlakuan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia kemudian diatur dalam hukum positif, yaitu melalui Tap MPR No. IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara serta Undang-Undang No. 25 Tahun 2000 mengenai Program Pembangunan Nasional 2000-2004. Dalam Tap MPR No. IV/MPR/1999, konsep pemerintahan yang baik dijelaskan secara lebih rinci sebagai berikut: 1. Menjamin terwujudnya kehidupan bermasyarakat

berdasarkan atas hukum dan perlindungan HAM. 2. Terbentuknya tatanan kehidupan yang demokratis. 3. Menegakkan keadilan sosial. 4. Mengupayakan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang memadai.

Pemerintahan yang berkualitas dan bebas dari penyimpangan membutuhkan prinsip-prinsip dasar yang meliputi keterbukaan proses (*disclosure*), tanggung jawab gugat publik (*accountability*), serta kewajiban untuk terbuka kepada masyarakat (*responsibility*). Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) memiliki visi yang lebih luas dari sekedar pengelolaan yang efisien dan pemanfaatan sumber daya yang hemat. Ini adalah strategi krusial dalam membangun institusi kemasyarakatan yang kokoh, mendorong sekaligus mendorong sektor publik/pemerintah agar lebih transparan, responsif, akuntabel, dan demokratis. Pengembangan konsep tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) akan melahirkan tata kelola modern (*modern governance*) yang mumpuni. Hal ini tidak hanya berfokus pada efisiensi operasional, namun juga pada akuntabilitas di hadapan publik (Arianto, 2013).

## **2.2 System Development Life Cycle (SDLC) Traditional**

Menurut Shelly dan Rosenblatt (2011), SDLC (*Systems Development Life Cycle*, Siklus Hidup Pengembangan Sistem) melibatkan perancangan, implementasi, dan pengujian perangkat lunak. Ini adalah metode yang menjelaskan seluruh proses konstruksi perangkat lunak demi menghasilkan aplikasi yang berkualitas dan sesuai dengan keinginan pengguna system.

Sistem ini dikembangkan melalui lima langkah sebagai berikut:

1. Pengumpulan data sebagai tahap awal dari SDLC adalah untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang permintaan sistem dengan melakukan fact-finding

struktur organisasi, wawancara, analisis dokumen terkini, observasi alur kerja, dan evaluasi pengguna. Temuan dari fase awal ini menjadi tolok ukur krusial dalam pengambilan keputusan, karena akan menentukan kelanjutan atau pengampunan seluruh daur hidup sistem.

2. Analisis sistem bertujuan untuk merancang logika sistem baru. Tahap awalnya melibatkan pemodelan sistem kebutuhan, di mana analis akan mengidentifikasi proses bisnis dan dokumen yang diperlukan agar sistem baru dapat memenuhi ekspektasi pengguna. Pada tahap ini, tujuannya adalah menentukan kapabilitas sistem informasi dalam memecahkan masalah, yang diperoleh dari dialog langsung antara pengguna dan manajer.

3. Pada tahapan pengembangan sistem ini mengintegrasikan temuan dari tahap terdahulu, dengan penerapan diagram aktivitas, relasi, dan struktur

4. Peranan antarmuka memegang peranan krusial, karena setiap individu menginginkan sistem yang mudah dipahami dan digunakan. Antarmuka Pengguna (UI) mendefinisikan interaksi pengguna dengan sistem komputasi, meliputi perangkat keras, perangkat lunak, layar, menu, fungsi, output, input, serta fitur-fitur yang mempengaruhi komunikasi dua arah antara pengguna dan komputer. Dalam tahap pembuatan desain antarmuka, analis wajib memahami konsep interaksi manusia-komputer dan prinsip-prinsip desain yang berorientasi pada pengguna. Hal ini esensial demi menghasilkan antarmuka pengguna yang mudah digunakan, menarik, dan efisien. Untuk memenuhi persyaratan ini, analis harus mengikuti delapan panduan pokok perancangan layar input data,

5. Pada fase sebelumnya dijelaskan tentang sistem desain, dari output tersebut dilakukan penerapan sistem baru sesuai dengan tahapan prosedur sebelumnya.

Implementasi sistem meliputi serangkaian tahapan: pengembangan aplikasi, pengujian, instalasi, dan evaluasi sistem baru.

### **2.3 Manajemen Risiko**

Manajemen risiko adalah serangkaian tindakan terkoordinasi yang dirancang untuk mengarahkan dan mengendalikan suatu organisasi dalam menghadapi potensi bahaya. Tujuannya adalah untuk mengelola risiko secara efektif dan memberikan saran penanganan yang tepat guna mencapai hasil yang paling baik. Proses ini pun menolong dalam pengambilan peningkatan kualitas keputusan dan efisiensi. Dari manajemen risiko, potensi munculnya risiko dengan konsekuensi signifikan bisa diminimalisir. Di instansi pemerintah, sejumlah besar dokumen penting perlu disimpan dalam sistem dan waktu secara teratur untuk menjaga keamanan serta mencegah kerusakan atau kehilangan data. Maka dari itu, lembaga pemerintahan sebaiknya mengimplementasikan manajemen risiko demi menganalisis potensi kejadian di masa mendatang. Adapun indikator dari manajemen risiko ada 2 (dua) yaitu identifikasi risiko dan analisis risiko (Risna dan Yandari, 2022).

#### **2.1.2 Identifikasi Risiko**

Identifikasi risiko sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Utara tujuannya adalah untuk mengidentifikasi potensi risiko yang berpotensi menghalangi tercapainya sasaran di lingkungan Pemerintah Daerah. Ini mencakup sasaran strategis Pemerintah Daerah, sasaran strategis entitas Perangkat Daerah, dan sasaran operasional (kegiatan) Perangkat Daerah. Proses identifikasi risiko dilaksanakan melalui kegiatan berikut: a. mengenali faktor-faktor

penghambat pencapaian tujuan, pemilik risiko, sebab risiko, sumber risiko, dan dampak risiko; b. mendokumentasikan proses identifikasi risiko dalam daftar risiko.

### 2.1.3 Analisis Risiko

Analisis risiko sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Utara merupakan prosedur untuk menetapkan sisa risiko besar yang melibatkan pengukuran tingkat probabilitas dan konsekuensinya. Tingkat risiko dapat ditetapkan berdasarkan hasil penilaian yang disebutkan pada ayat (1) untuk menjadi dasar penyusunan rencana tindakan pengendalian. Proses pelaksanaan analisis risiko, sesuai dengan yang dijelaskan pada ayat (1), mencakup serangkaian aktivitas, yaitu: a. menganalisis dampak dan potensi kemungkinan risiko; B. menguji validitas risiko; C. berkisar kontrol yang sudah ada dan yang diperlukan; serta d. menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP).

## 2.2 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Regulasi bidang keuangan negara telah membawa perubahan-perubahan akan diperlukan suatu sistem pengelolaan keuangan negara yang lebih efektif, efisien, akuntabel dan transparan. Perubahan ini hanya akan terwujud dengan membutuhkan komitmen dan integritas para *top leader* penyelenggara urusan pemerintah dalam pengendalian atas seluruh aktivitas penyelenggaraan pemerintahan di unit kerja di masing-masing. Perubahan dalam pelaksanaan sistem pengendalian yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan sistem pertanggungjawaban akan menciptakan pemerintah teratur, terkendali, dan berdaya secara optimal (Farmanta, 2022).

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 yang mengatur mengenai sistem pengendalian

intern. Pengertian sistem pengendalian intern menurut PP Nomor 60 Tahun 2008 Bb I pasal 1 butir 1 bahwa *“Proses yang integral pada Tindakan dan pengawasan yang berkelanjutan oleh manajemen dan seluruh staf bertujuan untuk memastikan tercapainya tujuan organisasi secara efektif dan efisien, mencerminkan laporan keuangan, pengamanan aset negara, serta kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku”* (Pemerintah Republik Indonesia, 2008).

Melalui implementasi SPIP, diharapkan tercapai tingkat keyakinan yang mampu dalam rangka mewujudkan tujuan organisasi, yakni:

1. Aktivitas yang efektif dan efisien
2. Informasi keuangan yang reliabel
3. Pengamanan aset negara
4. Kepatuhan pada peraturan hukum

Penyelenggaraan sistem pengendalian intern diatur dalam pasal 47 ayat 2 Peraturan Pemerintah (PP) nomor 60 tahun 2008 yang menjelaskan pengawasan intern merupakan salah satu bagian dari unsur monitoring, berfungsi instansi pemerintah. Pengaturan pengawasan internal mencakup berbagai elemen penting, yaitu struktur organisasi, ruang lingkup tanggung jawab, kualifikasi personel, etika profesi, tolok ukur audit, prosedur pelaporan, dan evaluasi rekan sejawat. Pengembangan dan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) meliputi beberapa tahapan kunci: penyusunan panduan teknis operasional, penyebarluasan informasi, program edukasi dan pengembangan keahlian, layanan pendampingan dan konsultasi terkait SPIP, serta peningkatan kapabilitas auditor Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Fungsi pengawasan internal berdasarkan penjelasan umum PP No. 60 Tahun 2008, dapat dipahami bahwa penerapan SPIP merupakan unsur integral yang mencakup seluruh rangkaian aktivitas dan dipengaruhi oleh sumber daya manusia, serta hanya memberikan keyakinan yang memadai, bukan keyakinan mutlak. Atas dasar tersebut fungsi sistem pengendalian intern berkembang menjadi panduan operasional dan tolak ukur validasi terhadap efektivitas penerapan pengendalian internal. Dalam pelaksanaannya, aspek-aspek seperti rasio biaya-manfaat, ketersediaan sumber daya manusia, spesifikasi kriteria pengukuran, dan inovasi teknologi informasi perlu diperhatikan. Proses ini harus dilakukan secara menyeluruh dan terpadu dengan setiap aktivitas dan kebijakan di lingkungan pemerintahan, baik pusat maupun daerah.

### **2.3 Penelitian Terdahulu**

Penelitian yang sudah dilaksanakan sebelumnya sangat relevan dan bisa berfungsi sebagai referensi utama dalam merencanakan serta melaksanakan penelitian selanjutnya. Penelitian-penelitian terdahulu menjadi titik tolak perbandingan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Adapun beberapa penelitian terkait dengan cakupan kajian ini adalah sebagai berikut:

Penelitian terdahulu yang diselenggarakan peneliti dengan adanya kerangka manajemen risiko SPBE ini, Pemerintah Kota Balikpapan diharapkan terbantu dalam mengimplementasikan praktik manajemen risiko pada seluruh aspek pelaksanaan tugas dan fungsi, termasuk dalam menghadapi berbagai permasalahan yang timbul di lingkungannya. Sehingga diketahui hasil penelitian yang berkembang belum di lingkungan ASN berimplikasi pada banyaknya aset organisasi yang belum teridentifikasi potensi risikonya. Kondisi ini menekankan

pentingnya pembekuan dan klarifikasi manajemen risiko, terutama dalam hal komunikasi dan konsultasi, dokumentasi dan pelaporan, serta evaluasi dan peninjauan yang wajib dilakukan secara rutin dan berkesinambungan seperti yang terdapat pada ISO 31000:2018 dan PermenPANRI no 5 tahun 2020 (Bisma, 2022).

Penelitian terdahulu yang dilakukan peneliti dengan untuk mengembangkan manajemen risiko di instansi pendidikan dengan cara mengidentifikasi dan mengurangi berbagai risiko yang terkait dengan sasaran program dan kegiatan. Manajemen risiko bertujuan untuk meminimalkan kemungkinan atau dampak risiko agar instansi dapat mencapai tujuannya secara efektif. Selain itu, jurnal ini juga menekankan pentingnya penilaian risiko untuk mengidentifikasi potensi bahaya yang dapat mengancam keberhasilan organisasi. Sehingga diketahui hasil penelitian bahwa Hasil penelitian dalam jurnal tersebut menunjukkan bahwa pengembangan manajemen risiko di instansi pendidikan melibatkan identifikasi dan pemetaan risiko yang mungkin dihadapi, baik dari dalam maupun luar lembaga. Penelitian menekankan pentingnya strategi penanganan risiko untuk meminimalkan dampak negatif dan memastikan keberhasilan pencapaian tujuan pendidikan. Secara keseluruhan, manajemen risiko dianggap krusial untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan operasional instansi pendidikan (Azmi dan Suriyadi, 2022).

Penelitian terdahulu yang dilakukan peneliti dengan tujuan menganalisis implementasi sistem pengendalian internal pemerintah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Utara, lalu membandingkannya dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. Sehingga diketahui hasil penelitian bahwa pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, penelitian

laporan tahunan, dan analisis laporan SPJ bendahara pengeluaran. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dinas Perindustrian telah mengimplementasikan lima unsur yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 yang diterapkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah ada 2 unsur yang belum diterapkan maksimal, yaitu unsur Kegiatan Pengendalian dan Informasi dan Komunikasi. Namun unsur Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, dan Pemantauan Pengendalian Internal telah diimplementasikan dan dijalankan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 (Mawikere et al, 2022).

Penelitian terdahulu yang dilakukan peneliti bertujuan guna mendeteksi serta mengendalikan risiko yang relevan dengan implementasi SPBE, membangun budaya kesadaran akan risiko dalam pelaksanaan tugas di lingkungan pemerintahan, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan risiko melalui penggunaan aplikasi berbasis website, dan memberikan dukungan dalam pengimplementasian manajemen risiko untuk mengatasi beragam problematika pada Dinas Komunikasi dan Informatika. Sehingga diketahui hasil penelitian dengan aplikasi manajemen risiko SPBE ini, potensi munculnya risiko baru yang disebabkan oleh penanganan risiko yang lambat dapat diminimalisir (Ayuningtyas dan Zulfitra, 2023).

Penelitian terdahulu yang dilakukan peneliti dengan bertujuan untuk menilai implementasi proses manajemen risiko dalam kerangka pengendalian internal pemerintah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bekasi. Hasil analisis ini diharapkan dapat memberikan evaluasi komprehensif serta memperluas pemahaman tentang praktik risiko manajemen di lingkungan pemerintahan. Sehingga diketahui hasil penelitian mengindikasikan bahwasanya

ada beragam kendala dalam implementasi manajemen risiko di Bappeda Kabupaten Bekasi, khususnya yang berkaitan dengan tingkat pemahaman Sumber Daya Manusia (SDM) Bappeda terhadap proses manajemen risiko itu sendiri (Ramdani et al, 2024).

Salah satu faktor yang mendasari perlunya penelitian lanjutan disebabkan perbedaan indikator Pengembangan Manajemen Risiko dalam mendukung Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara dan jenis penelitian kualitatif dan perbedaan lokasi antara penelitian sebelumnya dan penelitian saat ini juga menjadi faktor. Oleh karena itu, penelitian ini patut untuk meninjau kembali dengan indikator variabel, jenis, dan lokasi penelitian yang bervariasi.

**Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu**

No.	Penulis	Tujuan Penelitian	Hasil Penelitian
1	Bisma (2022)	Berpartisipasi aktif dalam upaya Pemerintah Kota Balikpapan untuk menerapkan manajemen risiko pada tugas dan fungsi pemerintahan	Karena budaya sadar risiko belum berkembang di kalangan Aparatur Sipil Negara, berbagai aset milik organisasi belum sepenuhnya memahami kerentanannya terhadap risiko, perlunya peningkatan budaya manajemen risiko terutama pada komunikasi, pencatatan, pelaporan, serta pemantauan yang berkesinambungan sesuai ISO 31000:2018 dan PermenPANRI No 5 Tahun 2020.
2	Azmi dan Suriyadi (2022)	Mengembangkan manajemen risiko di instansi pendidikan dengan	Pengembangan manajemen risiko melibatkan identifikasi dan pemetaan risiko dari

No.	Penulis	Tujuan Penelitian	Hasil Penelitian
		mengidentifikasi dan mengurangi risiko terkait sasaran program dan kegiatan	dalam dan luar lembaga, pentingnya strategi penanganan risiko untuk meminimalkan dampak negatif dan memastikan keberhasilan pencapaian tujuan pendidikan. Manajemen risiko krusial untuk efektivitas dan keberlanjutan operasional instansi pendidikan.
3	Mawikere et al. (2022)	Mengetahui penerapan sistem pengendalian intern pemerintah di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah menerapkan 3 dari 5 unsur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, namun kegiatan pengendalian dan informasi serta komunikasi belum diterapkan maksimal. Penerapan lingkungan pengendalian, penilaian risiko, dan pemantauan pengendalian internal telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4	Ayuningtyas dan Zulfitra (2023)	Mengidentifikasi dan mengelola risiko terkait implementasi SPBE, serta membangun budaya kesadaran risiko di lingkungan pemerintahan	Pengembangan aplikasi manajemen risiko SPBE ini bertujuan untuk menghindari munculnya risiko baru yang disebabkan oleh penanganan risiko yang terlambat. Aplikasi ini mendukung pengelolaan risiko yang lebih efektif dan efisien di lingkungan pemerintahan.
5	Ramdani et al. (2024)	Mengidentifikasi efektivitas proses pengelolaan risiko	Terdapat permasalahan memahami pemahaman Sumber Daya Manusia

No.	Penulis	Tujuan Penelitian	Hasil Penelitian
		dalam kerangka pengendalian internal pemerintah di Bappeda Kabupaten Bekasi	(SDM) Bappeda mengenai proses risiko manajemen. Penelitian menekankan pentingnya peningkatan pemahaman tentang pengelolaan risiko yang diterapkan di Bappeda Kabupaten Bekasi.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Penelitian ini bersifat studi kasus, menggunakan metode analisis kualitatif. Analisis kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi dan memahami secara mendalam sebuah fenomena (Strauss dan Corbin, 2013). Menurut Creswell (2014), penelitian kualitatif adalah pendekatan yang fokus pada eksplorasi dan pemahaman mendalam terhadap makna yang diinterpretasikan oleh individu atau kelompok, terutama terkait isu-isu sosial atau kemanusiaan yang mereka hadapi.

Untuk menguraikan suatu konteks alami yang khas, kita dapat menerapkan pendekatan menyeluruh yang melibatkan penjelasan berbasis kata dan bahasa, serta berbagai metode alamiah. Metode ini bertujuan untuk memperoleh data yang kemudian dianalisis secara kualitatif, dengan fokus pada informasi verbal seperti pernyataan tertulis atau tuturan dari pihak-pihak berkaitan (Moleong, 2018).

Peneliti memilih jenis penelitian kualitatif karena jenis penelitian tersebut cocok untuk digunakan pada kondisi objek yang peneliti ambil serta memberikan dukungan terhadap semua aspek dalam pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan peneliti nantinya.

Studi kasus merupakan salah satu jenis pendekatan dalam metode penelitian kualitatif yang menelaah sebuah “kasus”. Menurut Creswell (2015) penelitian studi kasus adalah pendekatan kualitatif yang penelitiannya mengeksplorasi kehidupan nyata, sistem terbatas kontemporer (kasus) atau beragam sistem terbatas (berbagai kasus) melalui pengumpulan data yang detail dan mendalam yang melibatkan beragam sumber informasi atau sumber informasi majemuk (misalnya;

pengamatan, wawancara, bahan audiovisual, dan dokumen dari berbagai laporan) serta melaporkan deskripsi kasus dan tema kasus. Adapun kasus-kasus dalam penelitian ini, strategi studi kasus dibatasi oleh waktu dan aktivitas.

### **3.2 Objek Penelitian**

Objek penelitian berlokasi di Inspektorat Daerah bidang Perencanaan dan Keuangan di Provinsi Kalimantan Utara. Inspektorat Daerah Kalimantan Utara dipilih sebagai objek karena sebagai Organisasi Perangkat Daerah Kaltara yang menjalankan pengembangan manajemen risiko sesuai dengan PERGUB.

### **3.3 Instrumen Penulisan**

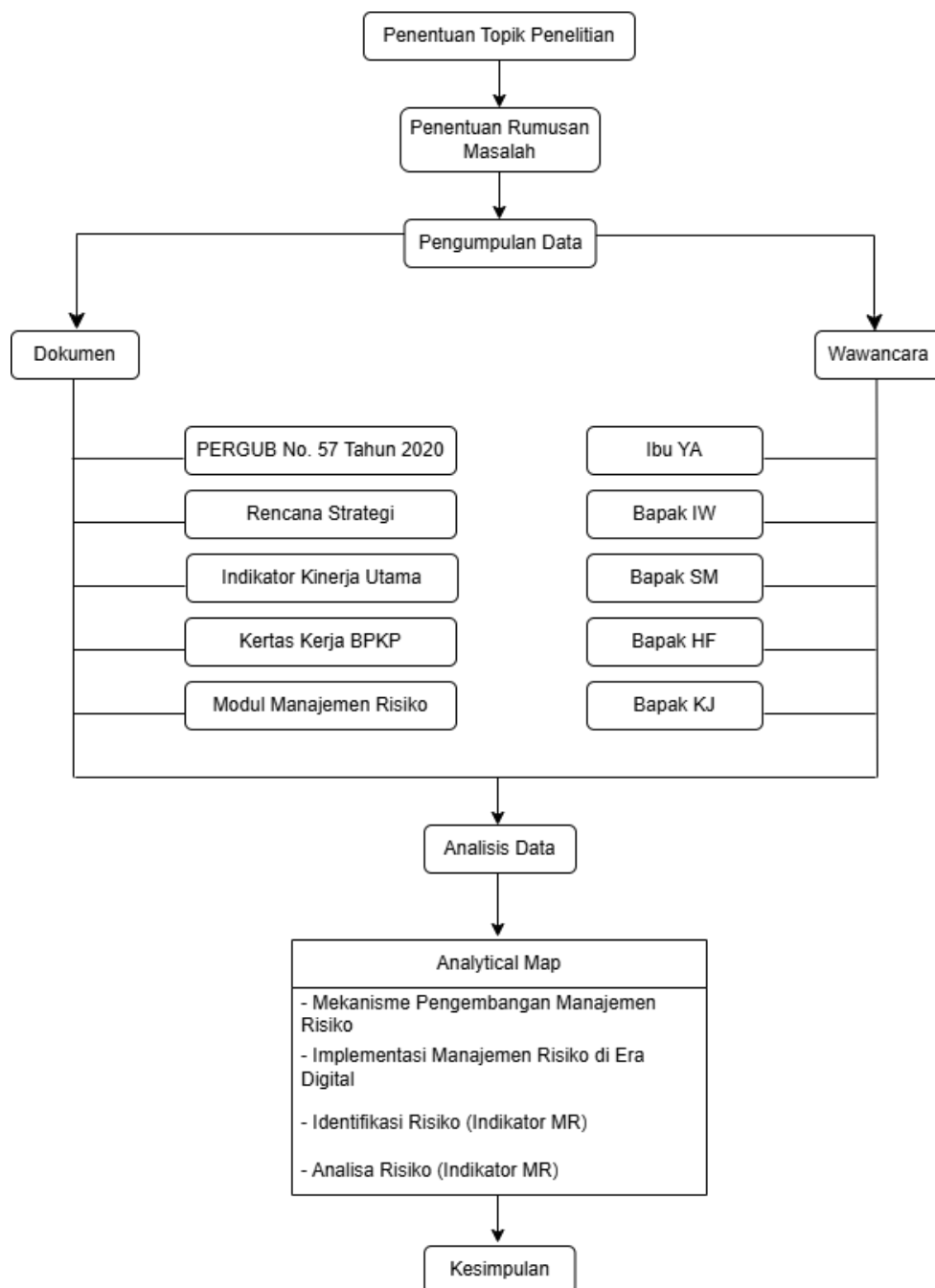
Dalam penelitian kualitatif, peneliti bertindak sebagai instrumen utama. Artinya, peneliti secara mandiri melaksanakan seluruh tahapan, mulai dari perancangan, pengumpulan, dan analisis data, hingga penyusunan laporan penelitian. Memahami interaksi antarmanusia tidak cukup hanya dengan pengetahuan teoritis. Oleh karena itu, penulis harus memahami dan merasakan langsung situasi yang ada demi meningkatkan pemahaman terhadap masalah yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini, alat bantu seperti tape recorder dan kamera digunakan oleh penulis untuk mencatat kejadian saat wawancara, dengan terlebih dahulu meminta persetujuan informan (Saleh, 2017).

### **3.4 Bagan Alur Penelitian**

Penelitian ini menggunakan indikator yang diturunkan dari konsep-konsep yang sudah dibahas secara mendalam di Bab II, yakni 1) Pengembangan Manajemen Risiko berupa Aplikasi Mariska, 2) Identifikasi risiko unsur Pengembangan Manajemen Risiko dalam mendukung Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), 3) Analisis Risiko unsur Pengembangan Manajemen Risiko

dalam mendukung Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, wawancara, serta peninjauan dokumen resmi. Dengan variabel ini, sebuah program ketiga dapat dikembangkan agar selaras dengan karakteristik suatu wilayah sehingga capaian program menjadi maksimal. Bagan alur penelitian tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

**Gambar 3. 1 Sistematika Penelitian**



### **3.5 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data**

Data tersusun atas karakter seperti huruf, angka, atau simbol khusus. Bentuknya yang mentah mengharuskan adanya pemrosesan lebih lanjut melalui model tertentu untuk memperoleh informasi (Edi dan Betshani, 2009).

Dalam penelitian ini, data sekunder menjadi sumber informasi yang digunakan. Data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen grafis, seperti tabel, catatan, pesan, foto dan lain-lain. Sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Sumber data yang diperoleh peneliti berupa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian yaitu dari Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Utara berhubungan dengan Manajemen Risiko.

#### **3.5.1 Sumber Data**

##### **1. Sumber Data Primer**

Pengumpulan data primer dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara. Adapun wawancara sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini, yakni:

- a. Ibu Yuniar Aspiati sebagai Inspektur Inspektorat Daerah Kaltara yang menerima amanat langsung pengembangan manajemen risiko
- b. Bapak Irfan Wihardianto sebagai Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
- c. Bapak Soni Muhson sebagai ahli bidang Manajemen Risiko dan ketua tim penilaian SPIP Kaltara
- d. Bapak Hanif Fahrur Rozi sebagai penyusun Aplikasi Manajemen Risiko
- e. Bapak Kevin Jonathan sebagai penyusun Aplikasi Manajemen Risiko

## 2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari dokumen PERGUB, Rencana Strategi, Modul Manajemen Risiko, Kertas Kerja BPKP terkait SPIP, Indikator Kinerja Utama dan dokumen lain yang berkaitan dengan pengembangan Manajemen Risiko dalam mendukung SPIP yang dianggap perlu dan relevan dalam penelitian ini.

### 3.5.2 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data, antara lain:

1. Wawancara: Teknik mengumpulkan data dalam wawancara dilaksanakan oleh peneliti dengan tujuan untuk memungkinkan pertanyaan yang diajukan peneliti secara langsung kepada informan. Melalui penggunaan teknik wawancara tak terstruktur merupakan wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan, namun untuk mendapatkan informasi yang lebih dalam tentang responden, maka peneliti dapat juga menggunakan wawancara tidak terstruktur (Sugiyono, 2017).
2. Dokumentasi: Istilah dokumentasi berasal dari dokumen, yang memiliki makna sebagai barang tertulis. Oleh karena itu, metode dokumentasi merujuk pada teknik pengumpulan data yang mengandalkan data-data yang sudah ada. Pendekatan ini mencakup pencarian dan pemanfaatan data-data yang relevan, seperti catatan dalam buku, peraturan, surat-menyurat, artikel

majalah, notula, agenda, dan lain-lain. Penulis melaksanakan kajian literatur, yang melibatkan pengumpulan data berupa teori-teori serta perundang-undangan yang relevan dengan Pengembangan Model Manajemen Risiko Dalam Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Era Digital Sebagai panduan dalam proses pengambilan, menganalisis, dan penilaian informasi dan data dari lapangan.

### **3.6 Analisis Data**

Menurut Creswell (2014), tahap analisis data, peneliti akan menggunakan Microsoft Word dan NVivo v12 sebagai alat bantu. Word digunakan untuk membantu mentranskrip hasil wawancara sedangkan NVivo v12 ini membantu dalam mengumpulkan, mengelompokkan, dan memetakan data untuk proses pengolahan dan analisis lebih lanjut. Penggunaan program komputer ini penting karena memfasilitasi peneliti untuk menyusun tingkat analisis yang komprehensif dan mengidentifikasi hubungan antara data mentah dengan tema yang lebih luas. Data dalam penelitian ini mengikuti model analisis yang diusulkan bahwa kegiatan analisis terdiri dari 3 aktivitas, yaitu penyaringan data, penyajian informasi, serta penyusunan simpulan (Miles et al., 2019)

Sebagai suatu pendekatan yang menyeluruh, analisis data ini tidak hanya menganalisis teks dan gambar, melainkan juga melibatkan pengaturan data, pemahaman awal struktur database, pengodean dan pengaturan tema, presentasi data, serta pembentukan interpretasi yang mendalam dari data. Output dari pengodean dalam analisis data ini memiliki kesamaan analisis dengan hasil pengodean pada fase literatur. Meskipun demikian, proses pengodean saat analisis data di lapangan menghasilkan keluaran yang identik, namun dengan kumpulan

data yang berbeda, berupa koding kueri matriks, analisis peta akhir, dan kerangka matriks (Creswell, 2014).

### **3.6.1 Koding**

Dalam analisis data kualitatif, koding adalah istilah atau ungkapan singkat yang paling sering muncul dan secara simbolis merangkum, menangkap inti penting, menyimpulkan isu utama, atau mewakili karakteristik yang mudah diingat dari data berbasis teks atau visual (Leavy, 2014). Sementara menurut Bazeley dan Jackson (2013), koding didefinisikan sebagai abstraksi dari suatu objek atau kejadian, atau sebagai teknik untuk menentukan tema-tema pokok dalam teks. Koding berperan dalam mengumpulkan seluruh informasi yang diperlukan dari berbagai referensi yang berhubungan dengan subjek penelitian.

### **3.6.2 Analytical Map**

Analytical map merupakan media visualisasi data yang aplikasinya dimulai oleh penulis setelah selesainya tahap pengodean di NVivo. Kegunaannya mencakup penggambaran pola, koneksi, dan isu-isu penting dalam penelitian data. Penulis menyusun peta analitik dengan menggabungkan node-node melalui bantuan garis-garis. Node-node di sini adalah simbol untuk konsep, kategori, atau tema data, sementara garis-garisnya berfungsi sebagai indikator keterhubungan antar konsep (Miles *et al.*, 2019).

Menurut Miles *et al.* (2019), memaparkan bahwasanya analytical maps memiliki potensi untuk mengungkap pola, hubungan, dan tema esensial dari data penelitian. Khususnya, peta analisis yang dihasilkan penulis dapat diterapkan guna memahami cara kerja penerapan strategi.

### 3.7 Uji Keabsahan Data

Mengingat adanya perbedaan pemahaman antara peneliti tentang data atau fenomena yang berkaitan dengan penelitian kualitatif, maka triangulasi sangat diperlukan. Fungsinya adalah untuk memvalidasi dan memastikan kerahasiaan yang baik dalam pengumpulan data maupun pemahamannya. Triangulasi merupakan strategi penelitian yang mengintegrasikan berbagai metode dalam pengumpulan dan analisis data. Tujuannya adalah untuk mendalami suatu fenomena atau data dari beragam perspektif, sehingga peneliti dapat mencapai pemahaman yang lebih komprehensif dan akurat. Dengan meninjau satu fenomena dari berbagai sisi, tingkat kebenaran hasil penelitian pun akan meningkat (Olsen, 2004). Selain itu, menurut Miles *et al.* (2019), Triangulasi bisa diartikan sebagai metode untuk memverifikasi keabsahan data atau informasi yang peneliti kumpulkan dari berbagai perspektif. Pendekatan ini membantu peneliti meminimalkan potensi bias selama proses pengumpulan maupun analisis data.

Penelitian ini menggunakan triangulasi sumber, sebuah teknik yang menjamin peneliti untuk mengumpulkan data dari beragam sumber yang ada. Menurut Moleong (2018), memaparkan bahwasanya triangulasi sumber dapat dilaksanakan melalui dua cara, yaitu: (1) mengkonfirmasi dengan membandingkan keterangan antar informan, dan (2) meninjau serta membandingkan kenyataan dan sudut pandang seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang lain, 3) membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen. Triangulasi yang dalam penelitian ini dengan Pemeriksaan data dilakukan dengan meninjau rekaman wawancara dari para informan kunci yang terlibat langsung. Di samping itu, data

wawancara dan dokumen-dokumen terkait yang dikumpulkan selama penelitian juga ikut diamati.

## **BAB IV**

### **ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Profil Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Utara**

##### **4.1.1 Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Utara**

Tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) Inspektorat Daerah Provinsi Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 20 Tahun 2016 Kalimantan Utara diatur dalam tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah. Sebagai bagian dari perangkat daerah, Inspektorat berperan sebagai unsur pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Tugas utama Inspektorat adalah menyusun dan melaksanakan kebijakan pengawasan terhadap urusan pemerintahan provinsi. Dalam menjalankan tugas ini, Inspektorat memiliki sejumlah fungsi, antara lain:

- a. Menyusun kebijakan teknis dan memfasilitasi kegiatan pengawasan sesuai dengan strategi yang ditetapkan pemerintah daerah
- b. Pengawasan internal dilakukan untuk memastikan kinerja dan keuangan berjalan optimal;
- c. Melakukan pengawasan khusus berdasarkan penugasan langsung dari Gubernur;
- d. Menyusun laporan hasil pengawasan;
- e. Mengelola administrasi internal Inspektorat;
- f. Membina jabatan fungsional seperti auditor;
- g. Menjalankan tugas-tugas lain yang didelegasikan oleh Gubernur selaras dengan wewenang dan tanggung jawabnya.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Inspektorat juga bertanggung jawab atas pengawasan administrasi umum pemerintahan yang

mencakup aspek regulasi lokal dan struktur organisasi, kepegawaian, keuangan, dan barang milik daerah. Selain itu, Inspektorat melakukan pengawasan terhadap: Urusan wajib dan pilihan pemerintahan,

- Dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan,
- Pemeriksaan akhir masa jabatan kepala daerah,
- Reviu laporan keuangan pemerintah daerah, serta
- Evaluasi Laporan Kinerja (LKjIP) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kabupaten/kota.

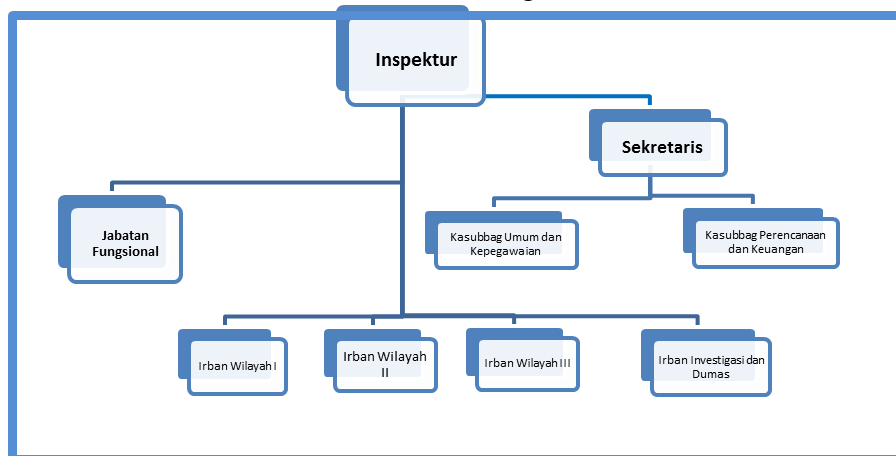
Tugas-tugas tersebut mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 08 Tahun 2013 serta Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

#### **4.1.2 Struktur Organisasi**

Untuk mendukung pelaksanaan fungsinya, Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Utara memiliki struktur organisasi sebagai berikut:

1. Inspektur Daerah
2. Sekretaris
3. Inspektur Pembantu Wilayah I, II, III, serta Inspektur Investigasi dan Pengaduan Masyarakat
4. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor dan P2UPD
5. Pelaksana

**Gambar 4. 1** Struktur Organisasi Umum



*Sumber Data : Bagian Umum dan Kepegawaian Inspektorat Daerah Prov Kaltara*

**Gambar 4. 2** Struktur Organisasi Inspektorat Daerah



*Sumber Data : Bagian Umum dan Kepegawaian Inspektorat Daerah Prov Kaltara*

### 4.1.3 Sumber Daya Aparatur

Jumlah pegawai negeri sipil (PNS) dan calon pegawai negeri sipil (CPNS) di Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Utara mencapai 51 orang pada tahun 2021 yang terdiri dari pejabat struktural 8 orang, Jabatan Fungsional Auditor 34 orang, Pejabat Pengawas Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD) 4 orang dan Jabatan fungsional umum 1 orang. Selain itu terdapat tenaga kontrak berjumlah 5 orang

dengan beragam latar belakang disiplin ilmu dan pendidikan. Berikut adalah data sumber daya manusia di lingkungan Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Utara, yang dituangkan berdasarkan jabatan, tingkat pendidikan, serta kepangkatan dan golongan.

#### **4.1.4 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Beberapa bentuk pelayanan dan pelaksanaan tugas Inspektorat antara lain:

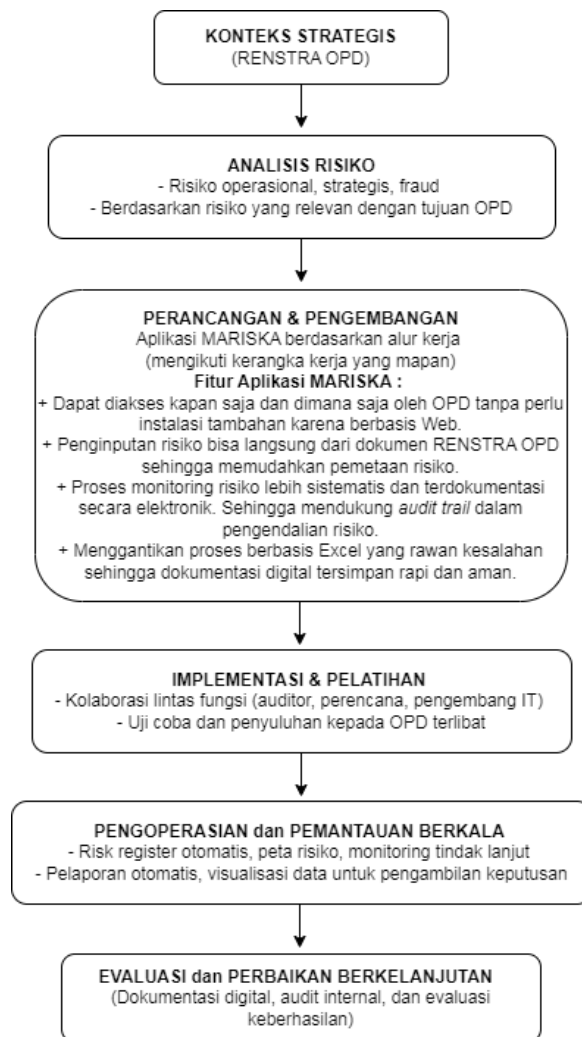
1. Penyusunan kebijakan teknis pengawasan pemerintahan daerah.
2. Penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja pengawasan di berbagai bidang.
3. Pemeriksaan kinerja terhadap perangkat daerah.
4. Audit keuangan dan pengelolaan aset.
5. Reviu laporan keuangan pemerintah daerah untuk mempertahankan opini WTP.
6. Asistensi dan evaluasi penerapan SPIP.
7. Penanganan pengaduan masyarakat.
8. Pengawasan program penanggulangan kemiskinan bersama BPKP dan Inspektorat Kabupaten/Kota.
9. Evaluasi SAKIP untuk menilai akuntabilitas kinerja perangkat daerah.
10. Evaluasi peran Inspektorat sebagai quality assurance dan konsultan.
11. Pengawasan bersama instansi lain.
12. Pendampingan dalam penyusunan neraca aset dan anggaran.
13. Dukungan terhadap pelaksanaan strategi nasional anti-korupsi.
14. Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pengawasan.
15. Evaluasi kinerja pemerintahan kabupaten/kota (EKPPD).
16. Pemeriksaan urusan pemerintahan, termasuk urusan wajib dan pilihan.

17. Pemeriksaan khusus berdasarkan pengaduan masyarakat atau instansi.
18. Audit akhir masa jabatan kepala daerah.
19. Pendampingan implementasi Permendagri No. 13 Tahun 2010.
20. Penyusunan program dan laporan hasil pengawasan.
21. Pelaksanaan urusan administrasi Inspektorat.
22. Pembinaan disiplin pegawai Inspektorat.
23. Pemberian advis terkait masalah pengawasan.
24. Pembinaan jabatan fungsional auditor dan pengawas pemerintahan (P2UPD).
25. Pelaksanaan tugas lain dari Kepala Daerah sesuai kewenangan.

## 4.2 Pengembangan Model Manajemen Risiko Berbasis Digital dalam Mendukung SPIP

Dalam pengembangannya dapat di definisikan secara singkat dengan skema berikut:

**Gambar 4. 3** Skema Pengembangan Model Manajemen Risiko

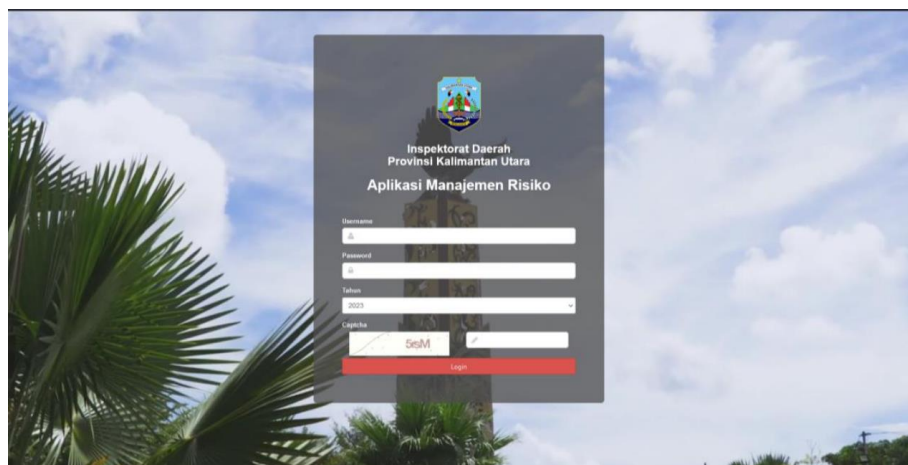


*Sumber Data : Hasil wawancara informan*

Skema pengembangan dan implementasi aplikasi MARISKA (Manajemen Risiko Kalimantan Utara) yang berfungsi untuk mendukung pengelolaan risiko secara digital di lingkungan pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Utara. Proses dimulai dari penetapan konteks strategis yang merujuk pada Rencana Strategis (RENSTRA) masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sehingga risiko yang dianalisis relevan dengan tujuan lembaga. Tahap berikutnya adalah analisis risiko yang mencakup risiko operasional, strategis, dan fraud, dilakukan berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan dalam RENSTRA. Selanjutnya, proses

perancangan dan pengembangan aplikasi MARISKA dilakukan dengan mengadopsi alur kerja berbasis dokumen strategis tersebut. Aplikasi ini memiliki keunggulan berupa akses berbasis web tanpa instalasi tambahan, fitur risk register otomatis, pemantauan risiko yang terekam secara elektronik, dan dokumentasi yang lebih rapi serta bebas dari duplikasi data sebagaimana yang sering terjadi pada sistem manual berbasis Excel. Setelah dioperasikan, aplikasi digunakan secara berkala untuk mencatat risiko, memantau tindak lanjut mitigasi, dan menghasilkan visualisasi data yang membantu proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, MARISKA tidak hanya menjadi alat digitalisasi risiko, tetapi juga bagian dari transformasi tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Dapat ditampilkan beberapa fitur dan penjabaran yang ada Aplikasi MARISKA :



Tampilan awal aplikasi yang akan muncul yaitu form login.

No	Sub Unsur	Hasil Reviu Dokumen		Hasil Survei Persepsi		Simpulan	Penjelasan	Perintah
		Hasil	Urutan	Hasil	Urutan			
1	Pengakuan Integritas dan Nilai Etik	-		Kurang Memadai		Kurang Memadai		<input checked="" type="checkbox"/>
2	Kemampuan Terhadap Kompetensi	-		Kurang Memadai		Kurang Memadai		<input checked="" type="checkbox"/>
3	Kapabilitas yang memadai	-		Kurang Memadai		Kurang Memadai		<input checked="" type="checkbox"/>
4	Struktur Organisasi Sesuai Kebutuhan	-		Kurang Memadai		Kurang Memadai		<input checked="" type="checkbox"/>
5	Pendidikan, Wawasan dan Tanggung jawab yang tepat	-		Kurang Memadai		Kurang Memadai		<input checked="" type="checkbox"/>
6	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM	-		Kurang Memadai		Kurang Memadai		<input checked="" type="checkbox"/>
7	Persiapan dan Penerapan ATP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) yang Efektif	-		Kurang Memadai		Kurang Memadai		<input checked="" type="checkbox"/>
8	Membangun Kerja yang Baik dengan Internal Pemerintah Terkait	-		Kurang Memadai		Kurang Memadai		<input checked="" type="checkbox"/>

Fitur yang menyajikan data hasil reviu dokumen dan hasil survei persepsi.

**PENILAIAN ATAS KEGIATAN PENGENDALIAN YANG ADA DAN MASIH DIBUTUHKAN**  
BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH  
TAHUN: 2023

No	Kondisi Lingkungan Pengendalian yang Kurang Memadai	Rencana Tindak Perbaikan Lingkungan Pengendalian	Penanggung jawab	Target Waktu Penyelesaian	Perintah
<b>1. Penegakan Integritas dan Nilai Etika</b>					
1	Banyak terjadi penempatan/pejabat daerah karena berangkat kelas hukum	Analisis/ujian kelemahan pengendalian kepatuhan hukum	BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH	Terdapat II 2023	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>2. Komitmen Terhadap Kompetensi</b>					
2	Pegawai belum ditempatkan sesuai dengan kompetensi dan pengalaman	Penyusunan peta kompetensi dan perbaikan SOP penempatan pegawai	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	Terdapat III 2023	<input checked="" type="checkbox"/>
	Bantuan bibit padi atas program pengabdian bibit di kawasan-kawasan Desa Perbatasan dengan tidak melakukan verifikasi di lapangan calon penerima dan aset jalan petani.				<input checked="" type="checkbox"/>
<b>3. Kepemimpinan yang kondusif</b>					
	Pimpinan belum menetapkan kebijakan pengelolaan risiko yang memberikan kejelasan arah pengetahuan risiko				<input checked="" type="checkbox"/>
	Rencana strategis dan rencana kerja pemda belum menyajikan informasi mengenai risiko				<input checked="" type="checkbox"/>
	Pelayanan sipas SIPIS di Provinsi Kalimantan Utara belum optimal dan terlewat register Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara tidak berjalan sebagaimana mestinya pada pertemuan mengenai praktik Diabter				<input checked="" type="checkbox"/>
<b>4. Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM</b>					

RTP Hasil Pengukuran yaitu penilaian atas kegiatan pengendalian yang ada, masih dibutuhkan dan rencana tindak perbaikan lingkungan pengendalian.

**KONTEKS RISIKO STRATEGIS**  
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI TAHUN 2023

Program yang akan dilakukan penilaian risiko + TAMBAH TUJUAN

No	Sasaran/Program Strategis	IKU	Target (%)	Perintah
Misi 1: Mewujudkan Kalimantan Utara, yang aman, nyaman dan damai melalui penyelenggaraan pemerintahan yang baik.				
Tujuan 1: Meningkatkan Kinerja Pelayanan Perhubungan				
1.1	Meningkatkan Kualitas Layanan Transportasi	-		<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
1.1.1	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase sarana dan prasarana angkutan jalan yang beroperasi		<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
1.1.2	Program Pengelolaan Pelayaran	Persentase prasarana angkutan pelayaran yang beroperasi		<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>

Dalam fitur konteks strategi pemda hanya bisa diisi oleh admin inspektorat, untuk konteks strategis OPD bisa diisi sesuai panduan. Tujuan instansi pemerintah sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaannya harus ditempatkan pada konteksnya untuk mempermudah penilaian risiko.

**IDENTIFIKASI RISIKO STRATEGIS OPD**  
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
TAHUN: 2023

MULAI SURVEI Excel PDF

NO	SASARAN/PROGRAM STRATEGIS	INDIKATOR	PERNYATAAN RISIKO	KODE RISIKO	PEMILIK RISIKO	SEBAB	SUMBER	U/C	DAMPAK	PIHAK YANG TERKENA	PERINTAH
Meningkatkan Kinerja Pelayanan Perhubungan											
1	Meningkatkan Kualitas Layanan Transportasi	-	Tingginya Angka Kecelakaan Lalu Lintas	RSQ.23041801	KEPALA	Minimnya Fasilitas Keselamatan Jalan di Jalan Provinsi	E	U	Tidak maksimalnya pelayanan transportasi di Provinsi Kalimantan Utara	Pemerintah Prov. Kaltara, Masyarakat	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
2			Pembangunan antar moda transportasi yang belum terintegrasi	RSQ.23041802	KEPALA DINAS	Belum tersinerginya Kebijakan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten	E	C	Tidak maksimalnya pelayanan transportasi di Provinsi Kalimantan Utara	Pemerintah Prov. Kaltara, Masyarakat	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>

Dalam fitur untuk memisahkan risiko kecil dan risiko besar, serta menganalisa dampak yang terjadi. Proses analisis risiko meliputi penentuan sumber risiko, status risiko, respon risiko, tingkat kemungkinan, tingkat dampak risiko yang akan terjadi.



NO	RISIKO YANG TERIDENTIFIKASI	KODE	KEMUNGKINAN		DAMPAK		TINGKAT RISIKO	PENJELASAN
			Uraian	Nilai	Uraian	Nilai		
1. Strategis OPD								
1.1	Adanya gratifikasi yang diberikan oleh auditi kepada auditor	RSO.23.35.04.01	Sering	3	Besar	3	9	risiko tinggi
2. Operasional OPD								
2.1	Adanya Gratifikasi	ROO.23.35.04.01	Sering	3	Sangat Besar	4	12	risiko sangat tinggi

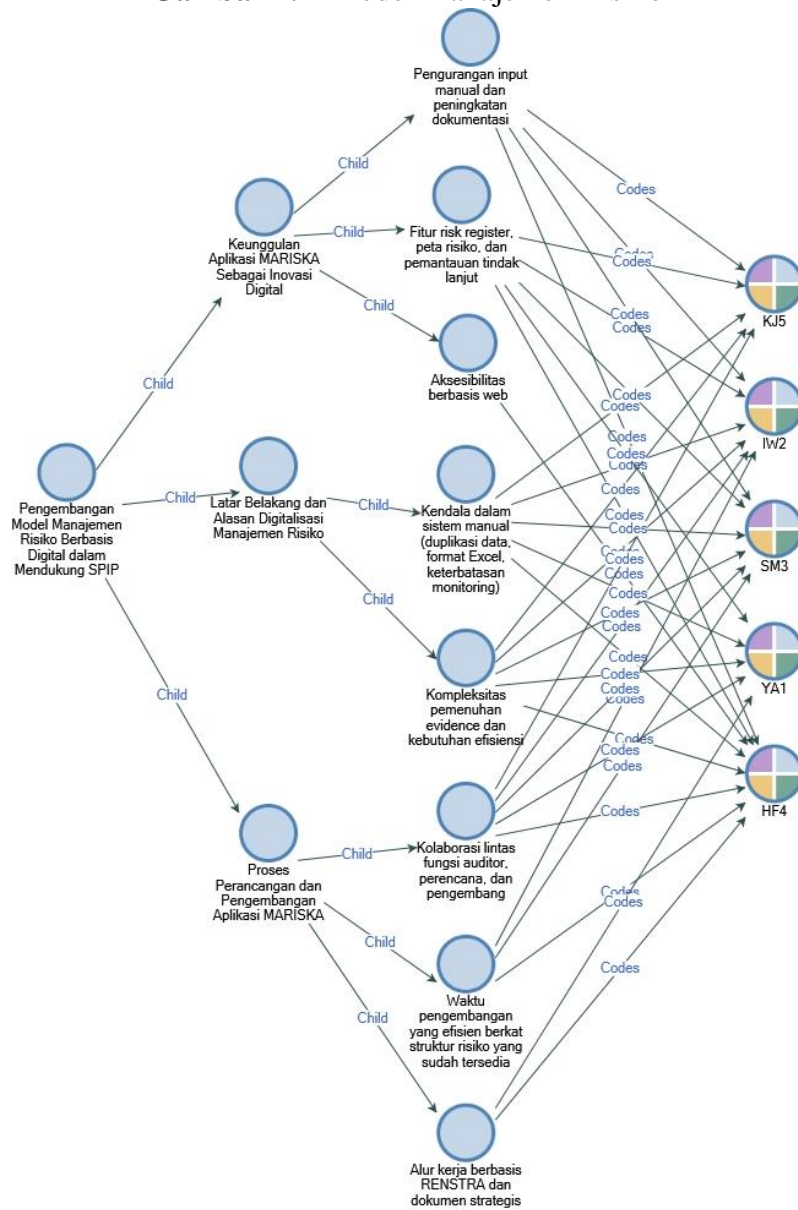
Fitur ini menyajikan tabulasi hasil analisis survei risiko.

**Tabel 4. 1** Kode Digitalisasi Manajemen Risiko

Latar Belakang dan Alasan Digitalisasi Manajemen Risiko	Kode
Kendala dalam sistem manual (duplikasi data, format Excel, keterbatasan monitoring)	YA1, IW2, SM3, HF4, KJ5, KJ5
Kompleksitas pemenuhan evidence dan kebutuhan efisiensi	YA1, IW2, SM3, HF4, KJ5
Proses Perancangan dan Pengembangan Aplikasi MARISKA	Kode
Alur kerja berbasis RENSTRA dan dokumen strategis	YA1, HF4
Kolaborasi lintas fungsi: auditor, perencana, dan pengembang	YA1, IW2, SM3, HF4, KJ5
Waktu pengembangan yang efisien berkat struktur risiko yang sudah tersedia	IW2, SM3, HF4
Keunggulan Aplikasi MARISKA Sebagai Inovasi Digital	Kode
Aksesibilitas berbasis web	HF4
Fitur risk register, peta risiko, dan pemantauan tindak lanjut	YA1, IW2, SM3, HF4, KJ5
Pengurangan input manual dan peningkatan dokumentasi	IW2, SM3, HF4, KJ5

Sumber : diolah menggunakan NVivo (2025)

**Gambar 4. 4 Model Manajemen Risiko**



Sumber : Diolah menggunakan NVivo

Pengembangan model manajemen risiko berbasis digital pada Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Utara dilatarbelakangi oleh berbagai kendala yang muncul dalam implementasi sistem manual. Para narasumber (YA1, IW2, SM3, HF4, dan KJ5) secara konsisten mengemukakan bahwa penggunaan format Excel yang tersebar di berbagai unit kerja menimbulkan duplikasi data, ketidakteraturan dokumentasi, dan kesulitan dalam pemantauan progres mitigasi risiko. Selain itu, proses manual menghambat kolaborasi lintas sektor karena tidak adanya sistem terpadu yang mampu mengintegrasikan data dari seluruh OPD secara real-time. Hal ini menjadi pemicu utama perlunya digitalisasi, untuk menciptakan sebuah platform yang dapat menyederhanakan proses, meningkatkan akurasi, dan mempercepat proses pelaporan serta evaluasi risiko. Seiring dengan itu, kompleksitas dalam pemenuhan evidence audit dan kebutuhan efisiensi pelaporan juga menjadi alasan krusial digitalisasi dilakukan. Dalam konteks SPIP, setiap risiko yang diidentifikasi harus didukung dengan evidence yang valid dan terdokumentasi. Sistem manual dianggap tidak lagi memadai untuk memenuhi standar audit internal maupun eksternal, terutama dalam hal kecepatan dan keterlacakan data. YA1 dan HF4 menyoroti pentingnya pencatatan elektronik untuk mendukung audit trail, sementara IW2, SM3, dan KJ5 menekankan bahwa dokumentasi digital memperkuat transparansi dan meningkatkan akuntabilitas. Penggunaan aplikasi juga mempermudah pencarian dan penyusunan dokumen pendukung, yang sebelumnya memakan waktu dan rentan kehilangan data.

Proses perancangan aplikasi MARISKA dibangun berdasarkan kerangka kerja yang sudah mapan, yaitu dokumen perencanaan strategis seperti RENSTRA OPD. Alur kerja dalam aplikasi mengikuti logika manajemen kinerja pemerintah

daerah, sehingga risiko yang dianalisis benar-benar relevan terhadap sasaran program. YA1 menjelaskan bahwa input data dimulai dari konteks strategis OPD, yang kemudian dikembangkan ke dalam risiko operasional, strategis, maupun fraud. HF4 menambahkan bahwa struktur RENSTRA menjadi acuan penting agar risiko yang dimasukkan bersifat kontekstual dan berdampak terhadap tujuan lembaga. Dalam pengembangannya, MARISKA melibatkan kolaborasi lintas fungsi yang solid antara auditor sebagai pengguna utama, perencana sebagai penyusun konteks kerja, serta tim pengembang IT. Seluruh narasumber sepakat bahwa kolaborasi ini merupakan kunci kesuksesan proses digitalisasi, terutama dalam menghindari kesenjangan antara aspek teknis dan kebutuhan praktis lapangan. Bahkan, dalam tahap uji coba dan pelatihan, perwakilan dari setiap OPD dilibatkan untuk menjamin kesiapan implementasi dan penerimaan sistem secara luas. Keberadaan kerangka risiko yang sebelumnya sudah tersusun secara manual juga mempercepat proses digitalisasi. IW2, SM3, dan HF4 menyebut bahwa format Excel dan SOP lama digunakan sebagai referensi untuk membangun logika alur sistem dalam aplikasi MARISKA, sehingga waktu pengembangan menjadi lebih efisien.

Sebagai sebuah inovasi digital, MARISKA memiliki sejumlah keunggulan, sebagai berikut:

1. Aplikasinya berbasis web, yang berarti dapat diakses kapan saja dan dari perangkat manapun tanpa instalasi khusus. HF4 menyebut bahwa aksesibilitas ini mendukung fleksibilitas kerja lintas OPD.
2. MARISKA menghadirkan fitur-fitur penting seperti risk register otomatis, peta risiko berdasarkan skala dampak dan probabilitas, serta monitoring tindak lanjut

rencana pengendalian. YA1 menyatakan bahwa siklus manajemen risiko kini dapat dilacak secara komprehensif dalam satu sistem. IW2 dan SM3 menggarisbawahi keunggulan fitur pelaporan otomatis, yang membantu efektivitas penilaian SPIP. Sementara HF4 dan KJ5 menekankan manfaat visualisasi dalam meningkatkan pemahaman dan mempercepat pengambilan keputusan.

3. Aplikasi ini juga secara nyata mengurangi ketergantungan pada proses manual. Dengan hilangnya kebutuhan input melalui Excel, sistem pengarsipan menjadi lebih terstruktur, dan waktu kerja berkurang secara baik. IW2, SM3, HF4, dan KJ5 menyatakan bahwa otomatisasi input data tidak hanya mempercepat proses, tetapi juga meningkatkan kualitas dokumentasi yang terekam secara digital dan siap ditelusuri kapan saja. Secara keseluruhan, pengembangan MARISKA merupakan langkah strategis dalam meningkatkan efektivitas manajemen risiko dan penguatan SPIP.

Inovasi ini lahir dari kebutuhan nyata di lapangan, dikembangkan secara kolaboratif, dan dirancang berbasis pada kerangka kerja yang telah ada. Dengan mengatasi kendala sistem manual dan menghadirkan solusi digital terintegrasi, MARISKA mampu menjadi contoh praktik baik dalam transformasi digital sektor pengawasan pemerintah daerah.

#### **4.3 Implementasi Model Manajemen Risiko Digital di Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Utara**

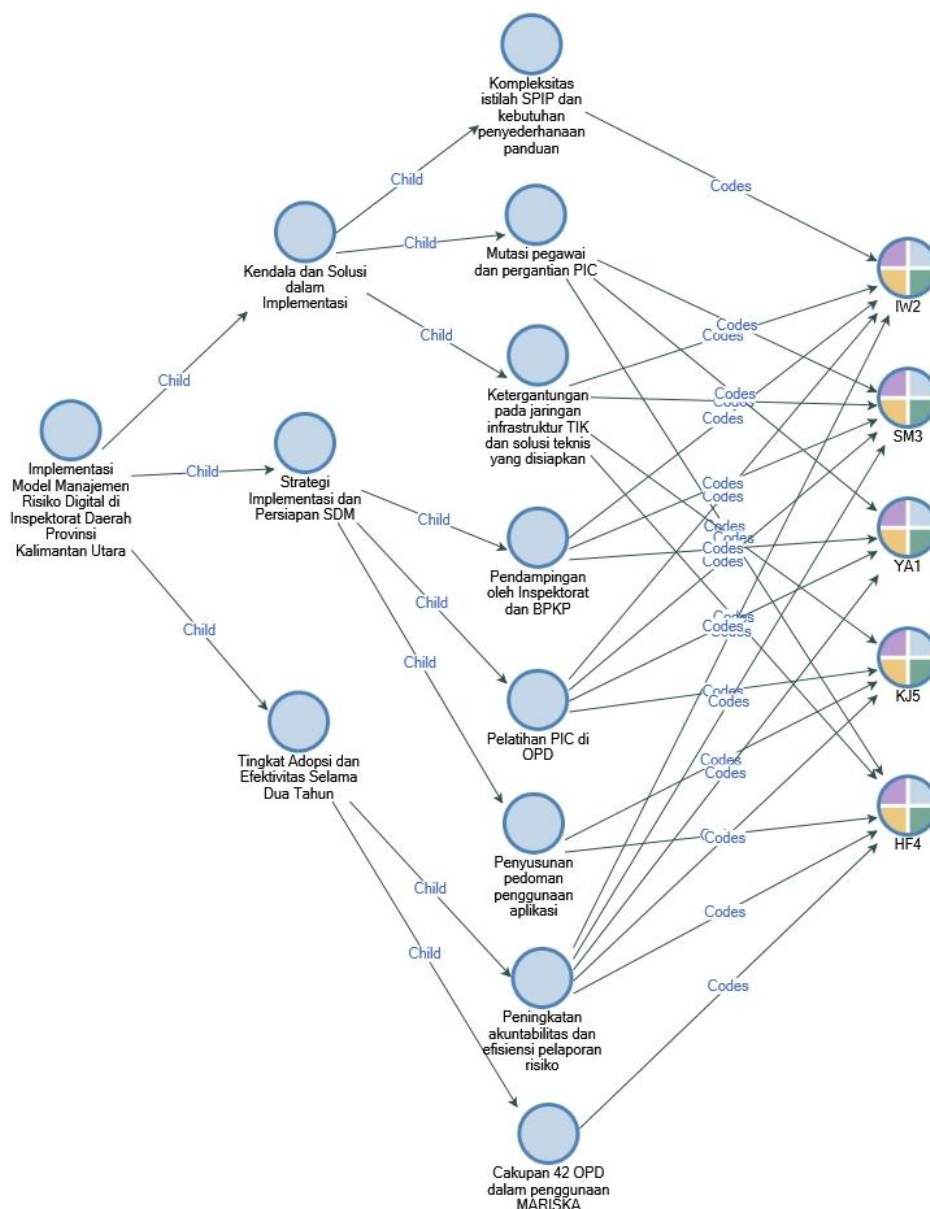
**Tabel 4. 2** Kode Strategi Implementasi Persiapan SDM

Strategi Implementasi dan Persiapan SDM	Kode
Pelatihan PIC di OPD	YA1, IW2, SM3, KJ5

Strategi Implementasi dan Persiapan SDM	Kode
Penyusunan pedoman penggunaan aplikasi	YA1, IW2, SM3, HF4, KJ5
Proses Perancangan dan Pengembangan Aplikasi MARISKA	HF4, KJ5
Alur kerja berbasis RENSTRA dan dokumen strategis	YA1, HF4
Pendampingan oleh Inspektorat dan BPKP	YA1, IW2, SM3
Tingkat Adopsi dan Efektivitas Selama Dua Tahun	Kode
Keunggulan Aplikasi MARISKA Sebagai Inovasi Digital	Kode
Cakupan 42 OPD dalam penggunaan MARISKA	HF4
Peningkatan akuntabilitas dan efisiensi pelaporan risiko	YA1, IW2, SM3, HF4, KJ5
Kendala dan Solusi dalam Implementasi	Kode
Mutasi pegawai dan pergantian PIC	YA1, SM3, HF4
Kompleksitas istilah SPIP dan kebutuhan penyederhanaan panduan	IW2
Ketergantungan pada jaringan/infrastruktur TIK dan solusi teknis yang disiapkan	IW2, SM3, HF4, KJ5

*Sumber : diolah menggunakan NVivo (2025)*

**Gambar 4. 5** Strategi Impementasi SDM



Sumber : diolah menggunakan NVivo (2025)

Implementasi Aplikasi MARISKA di Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Utara dimulai dengan strategi implementasi yang melibatkan persiapan sumber daya manusia (SDM) yang matang. Beberapa langkah yang dilakukan Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Utara, sebagai berikut:

1. Pelatihan yang diberikan kepada Penanggung Jawab (PIC) Manajemen Risiko di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Pelatihan ini bertujuan

agar setiap OPD dapat secara mandiri menyusun dan memetakan risiko melalui aplikasi MARISKA. YA1 menjelaskan bahwa pelatihan dilakukan secara berkala dengan fokus utama pada peningkatan kapasitas teknis dan pemahaman konsep SPIP berbasis digital. IW2 dan SM3 menambahkan bahwa pelatihan ini juga difokuskan untuk memperkuat pemahaman mengenai penggunaan aplikasi dalam mengelola risiko dan menghasilkan laporan yang sesuai dengan standar yang berlaku. KJ5 mengingatkan pentingnya membangun SDM yang familiar dengan aplikasi, guna memastikan keberlanjutan penggunaan sistem ini dalam jangka panjang. Sebagai bagian dari persiapan implementasi,

2. Penyusunan pedoman penggunaan aplikasi MARISKA menjadi hal yang sangat penting. HF4 mengungkapkan bahwa pedoman ini mencakup berbagai langkah teknis terkait penginputan data, serta FAQ yang dapat memudahkan pengguna baru dalam memahami cara kerja aplikasi. KJ5 menambahkan bahwa buku pedoman ini juga berfungsi sebagai acuan standar operasional, yang akan mencegah perbedaan interpretasi di antara para pengguna. Pedoman yang jelas sangat penting untuk menjaga konsistensi penggunaan aplikasi di seluruh OPD.
3. Selain pelatihan dan penyusunan pedoman, Inspektorat juga melakukan pendampingan berkelanjutan untuk memastikan implementasi MARISKA berjalan dengan lancar. Pendampingan ini mencakup aspek teknis dan substantif, seperti penginputan risiko, validasi indikator, dan interpretasi peta risiko yang dihasilkan oleh aplikasi. YA1 dan IW2 menyebutkan bahwa Inspektorat aktif memberikan dukungan langsung kepada OPD, dan

bekerja sama dengan BPKP untuk memperkuat akurasi serta tata kelola sistem yang diterapkan. Kolaborasi dengan BPKP menjadi sangat strategis dalam menjaga kualitas dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip SPIP yang telah ditetapkan.

Setelah dua tahun implementasi, Aplikasi MARISKA telah berhasil diadopsi oleh seluruh 42 OPD di Provinsi Kalimantan Utara. HF4 menyatakan bahwa pencapaian ini menunjukkan tingginya komitmen dan keterbukaan OPD terhadap transformasi digital dalam pengelolaan manajemen risiko. Setiap OPD kini menggunakan sistem ini untuk menyusun risk register, merencanakan mitigasi risiko, dan menyusun laporan SPIP yang lebih terintegrasi dan terpusat. YA1 menekankan bahwa penggunaan MARISKA telah meningkatkan akuntabilitas karena pelaporan dapat dilakukan dengan standar yang lebih terstruktur dan dipantau secara real-time. IW2 dan SM3 juga menilai adanya peningkatan efisiensi, dengan berkurangnya kesalahan input dan lebih mudahnya evaluasi risiko lintas periode. HF4 dan KJ5 menambahkan bahwa otomatisasi dalam dokumentasi juga memudahkan proses audit dan penilaian SPIP, yang sebelumnya memerlukan waktu lebih lama dan rawan kesalahan.

Namun, implementasi digital tidak terlepas dari kendala. Beberapa tantangan yang dihadapi, sebagai berikut:

1. Mutasi pegawai dan pergantian PIC di masing-masing OPD. YA1 dan SM3 menjelaskan bahwa ketika terjadi pergantian PIC, ada kebutuhan untuk pelatihan ulang dan pembaruan kredensial pengguna. Untuk mengatasi hal ini, HF4 mengusulkan penyusunan pedoman yang lebih detail sebagai

langkah mitigasi terhadap pergantian personel, serta menyediakan helpdesk digital yang siap membantu.

2. Kendala lain yang muncul adalah kompleksitas istilah-istilah SPIP yang dirasa membingungkan bagi pegawai yang tidak berlatar belakang auditor. IW2 mengusulkan agar terminologi yang digunakan dalam aplikasi disederhanakan, sehingga dapat dipahami dengan mudah oleh semua pihak, terutama oleh pegawai non-auditor di OPD.
3. Selain itu, ketergantungan pada infrastruktur TIK yang memadai juga menjadi kendala dalam implementasi aplikasi ini. Beberapa daerah dengan jaringan internet yang terbatas mengalami hambatan dalam mengakses aplikasi. IW2 dan SM3 mencatat bahwa beberapa OPD terhambat karena koneksi internet yang lambat, sementara HF4 mengungkapkan bahwa solusi yang sedang disiapkan adalah dengan menambahkan fitur offline input dalam pembaruan sistem berikutnya. KJ5 menambahkan bahwa koordinasi dengan Dinas Kominfo dilakukan untuk memastikan ketersediaan infrastruktur jaringan yang memadai agar aplikasi dapat berjalan dengan optimal di seluruh OPD.

Secara keseluruhan, implementasi Aplikasi MARISKA di Provinsi Kalimantan Utara telah membawa perubahan yang baik dalam pengelolaan manajemen risiko dan penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Pelatihan intensif, penyusunan pedoman yang komprehensif, serta pendampingan berkelanjutan telah berhasil mengintegrasikan sistem ini ke dalam rutinitas operasional 42 OPD. Digitalisasi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas pelaporan risiko, tetapi juga memperkuat tata kelola dan pengendalian

risiko yang lebih efektif di seluruh pemerintah daerah. Dengan adanya inovasi ini, diharapkan SPIP dapat beroperasi lebih baik, transparan dan akuntabel dan bisa menghadirkan dampak positif yang lebih luas untuk pemerintahan daerah

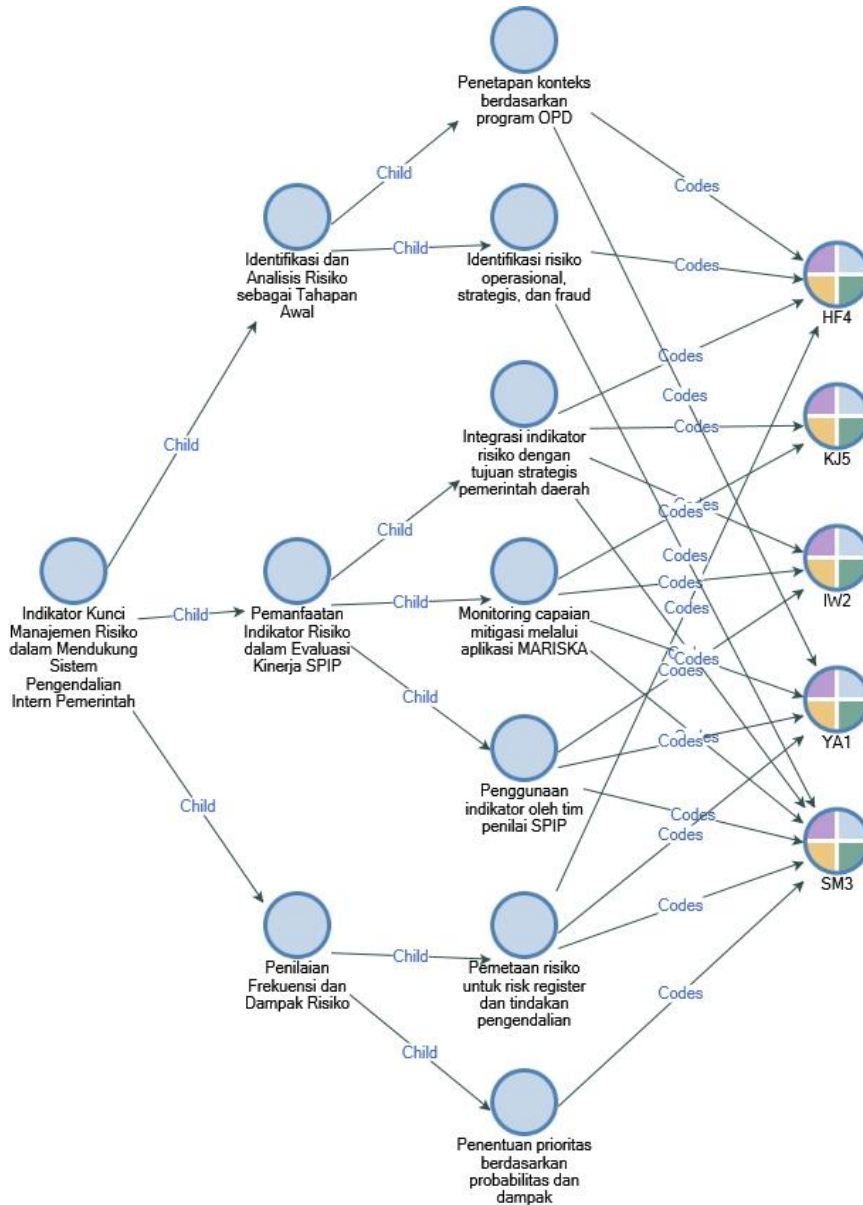
#### **4.4 Indikator Kunci Manajemen Risiko dalam Mendukung Sistem Pengendalian Intern Pemerintah**

**Tabel 4. 3** Kode Identifikasi dan Analisis Risiko

<b>Identifikasi dan Analisis Risiko sebagai Tahapan Awal</b>	<b>Kode</b>
Penetapan konteks berdasarkan program OPD	YA1, HF4
Identifikasi risiko operasional, strategis, dan fraud	SM3, HF4
Penilaian Frekuensi dan Dampak Risiko	Kode
Penentuan prioritas berdasarkan probabilitas dan dampak	SM3
Pemetaan risiko untuk risk register dan tindakan pengendalian	YA1, SM3, HF4
Pemanfaatan Indikator Risiko dalam Evaluasi Kinerja SPIP	Kode
Penggunaan indikator oleh tim penilai SPIP	YA1, IW2, SM3
Monitoring capaian mitigasi melalui aplikasi MARISKA	YA1, IW2, SM3, KJ5
Integrasi indikator risiko dengan tujuan strategis pemerintah daerah	IW2, SM3, HF4, KJ5

*Sumber : diolah menggunakan NVivo (2025)*

**Gambar 4. 6** Proses Identifikasi Risiko



Sumber : diolah menggunakan NVivo (2025)

Proses identifikasi risiko dimulai dengan penetapan konteks yang berdasarkan pada program, kegiatan, dan sasaran strategis setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Berikut penjabaran nya:

1. Penetapan konteks yang jelas dan terarah ini menjadi dasar dalam menyusun indikator risiko yang relevan dan terukur. YA1 menjelaskan bahwa risiko yang teridentifikasi harus berhubungan langsung dengan output dari Rencana Strategis (RENSTRA) masing-masing OPD, sehingga relevansi

dan akurasi analisis risiko dapat terjamin. HF4 menambahkan bahwa penetapan konteks ini sangat penting, karena setiap OPD memiliki karakteristik dan tantangan yang berbeda, yang berarti bahwa setiap OPD perlu mengidentifikasi risiko dengan pendekatan yang sesuai dengan tujuan mereka.

2. Selanjutnya, risiko diklasifikasikan dalam tiga kategori utama, yaitu risiko operasional, strategis, dan fraud. SM3 menjelaskan bahwa risiko operasional biasanya berhubungan dengan kelancaran kegiatan operasional sehari-hari, risiko strategis berkaitan dengan kegagalan dalam mencapai tujuan strategis jangka panjang, sedangkan risiko fraud mengacu pada potensi penyimpangan atau kecurangan yang dapat merugikan organisasi. HF4 menekankan pentingnya pemetaan risiko ini agar indikator yang ditetapkan sesuai dengan tingkat eksposur risiko pada masing-masing area, sehingga proses pengendalian dapat lebih tepat sasaran.
3. Setelah risiko teridentifikasi, tahap berikutnya adalah penilaian terhadap frekuensi (probabilitas) dan dampak (severity) yang ditimbulkan oleh masing-masing risiko. SM3 menjelaskan bahwa penilaian risiko dilakukan baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Hasil penilaian ini kemudian dipetakan dalam sebuah matriks risiko untuk menentukan prioritas penanganan. Risiko dengan kombinasi probabilitas tinggi dan dampak yang berat akan menjadi prioritas dalam proses mitigasi. Tujuan dari proses ini adalah menyajikan gambaran yang transparan mengenai potensi risiko yang dihadapi serta tingkat urgensinya. Penilaian ini juga berfungsi sebagai dasar

untuk menyusun risk register dan menentukan tindakan pengendalian yang tepat sesuai dengan tingkat prioritas risiko.

4. Setelah penilaian risiko dilakukan, pemetaan risiko selanjutnya disusun ke dalam risk register, yang menjadi dokumen utama untuk memantau mitigasi dan tindak lanjut terhadap setiap risiko yang teridentifikasi. YA1 menjelaskan bahwa penggunaan MARISKA sebagai platform berbasis digital memungkinkan pemantauan risiko yang lebih efisien dan sistematis, serta memberikan kemudahan dalam pencatatan, pelaporan, dan analisis historis risiko. SM3 menambahkan bahwa pemetaan risiko ini penting karena membantu mengintegrasikan antara kegiatan operasional OPD dengan pengelolaan risikonya, sehingga memudahkan pengawasan dan pengendalian. HF4 menyatakan bahwa keberadaan risk register berbasis aplikasi sangat mendukung dalam mempercepat proses analisis dan pelaporan, serta menjaga agar proses mitigasi risiko tetap terpantau secara berkelanjutan.

Indikator risiko yang telah ditetapkan tidak hanya digunakan sebagai alat pengendalian, tetapi juga berfungsi sebagai alat ukur dalam evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). YA1 dan IW2 menyebutkan bahwa indikator-indikator ini menjadi referensi utama dalam penilaian apakah pengendalian risiko yang dilakukan sesuai dengan eksposur risiko yang dihadapi. SM3 menegaskan bahwa penting bagi indikator yang digunakan untuk bersifat objektif, konsisten, dan berbasis pada bukti yang jelas agar evaluasi SPIP menjadi akurat dan dapat dijadikan dasar untuk perbaikan lebih lanjut.

Aplikasi MARISKA memiliki fitur yang memungkinkan pelacakan capaian mitigasi secara real-time. YA1 dan IW2 menjelaskan bahwa fitur ini memungkinkan pengguna untuk melihat perkembangan upaya penanganan risiko secara langsung. SM3 dan KJ5 menambahkan bahwa adanya dashboard dan grafik visualisasi dalam aplikasi membantu auditor dalam memantau progres mitigasi dan merumuskan tindakan korektif dengan lebih mudah dan efisien. Selain itu, indikator risiko yang dibangun dalam aplikasi MARISKA harus terintegrasi dengan tujuan strategis RPJMD dan RENSTRA OPD. Hal ini memastikan bahwa pengelolaan risiko tidak hanya berfokus pada identifikasi dan mitigasi ancaman, tetapi juga berfungsi sebagai strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran pemerintah daerah. IW2 dan SM3 menjelaskan bahwa dengan pendekatan yang sistematis, risiko yang teridentifikasi tidak hanya menjadi hambatan, tetapi dapat menjadi peluang untuk meningkatkan tata kelola jika dimonitor dan dikelola dengan baik. HF4 dan KJ5 menekankan bahwa integrasi ini menciptakan sistem pengendalian yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga efektif dalam mendukung pencapaian hasil kinerja pemerintah daerah.

Indikator kunci dalam manajemen risiko memainkan peran yang sangat penting dalam mendukung keberhasilan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Provinsi Kalimantan Utara. Dimulai dari penetapan konteks yang mengacu pada program OPD, proses identifikasi risiko, hingga pemetaan risiko dan penentuan prioritas, seluruh tahapan ini mendukung sistem pengendalian yang lebih transparan dan terstruktur. Dengan memanfaatkan aplikasi MARISKA, seluruh indikator dapat dikembangkan, dimonitor, dan dievaluasi secara digital dan terintegrasi, sehingga mendukung akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan yang

lebih adaptif dan berbasis pada risiko. Proses ini mengarah pada pengelolaan risiko yang tidak hanya berfungsi sebagai mitigasi ancaman, tetapi juga berpotensi sebagai alat untuk pencapaian hasil kinerja pemerintah yang efektif.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan Penelitian**

Dari hasil pembahasan dan analisis yang sudah penulis paparkan, bisa disimpulkan hal-hal berikut:

1. Dalam Pengembangan Model Manajemen Risiko Berbasis Digital dalam Mendukung SPIP proses perancangan aplikasi MARISKA sudah dibangun berdasarkan kerangka kerja yang sudah mapan, yaitu dokumen perencanaan strategis seperti RENSTRA OPD. Alur kerja dalam aplikasi mengikuti logika manajemen kinerja pemerintah daerah, sehingga risiko yang dianalisis benar-benar relevan terhadap sasaran program. Dalam pengembangannya, MARISKA melibatkan kolaborasi lintas fungsi yang solid antara auditor sebagai pengguna utama, perencana sebagai penyusun konteks kerja, serta tim pengembang IT. Seluruh narasumber sepakat bahwa kolaborasi ini merupakan kunci kesuksesan proses digitalisasi, terutama dalam menghindari kesenjangan antara aspek teknis dan kebutuhan praktis lapangan. Bahkan, dalam tahap uji coba dan pelatihan, perwakilan dari setiap OPD dilibatkan untuk menjamin kesiapan implementasi dan penerimaan sistem secara luas. Keberadaan kerangka risiko yang sebelumnya sudah tersusun secara manual juga mempercepat proses digitalisasi. Informan menyebut bahwa format Excel dan SOP lama digunakan sebagai referensi untuk membangun logika alur sistem dalam aplikasi MARISKA, sehingga waktu pengembangan menjadi lebih efisien. Sehingga, Inovasi ini lahir dari kebutuhan nyata di lapangan, dikembangkan secara kolaboratif, dan dirancang berbasis pada kerangka kerja yang telah

ada. Dengan mengatasi kendala sistem manual dan menghadirkan solusi digital terintegrasi, MARISKA mampu menjadi contoh praktik baik dalam transformasi digital sektor pengawasan pemerintah daerah.

2. Implementasi Model Manajemen Risiko Digital di Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Utara sudah dua tahun implementasi, Aplikasi MARISKA telah berhasil diadopsi oleh seluruh 42 OPD di Provinsi Kalimantan Utara. Setiap OPD kini menggunakan sistem ini untuk menyusun risk register, merencanakan mitigasi risiko, dan menyusun laporan SPIP yang lebih terintegrasi dan terpusat. Secara keseluruhan, implementasi Aplikasi MARISKA di Provinsi Kalimantan Utara telah membawa perubahan yang baik dalam pengelolaan manajemen risiko dan penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Pelatihan intensif, penyusunan pedoman yang komprehensif, serta pendampingan berkelanjutan telah berhasil mengintegrasikan sistem ini ke dalam rutinitas operasional 42 OPD. Digitalisasi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas pelaporan risiko, tetapi juga memperkuat tata kelola dan pengendalian risiko yang lebih efektif di seluruh pemerintah daerah. Dengan adanya inovasi ini, diharapkan SPIP dapat beroperasi lebih baik, transparan dan akuntabel dan mampu menghadirkan manfaat yang lebih baik untuk pemerintahan daerah.
3. Indikator Kunci Manajemen Risiko dalam Mendukung Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Indikator risiko yang telah ditetapkan tidak hanya digunakan sebagai alat pengendalian, tetapi juga berfungsi sebagai alat ukur dalam evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Indikator-indikator ini menjadi referensi utama dalam penilaian apakah pengendalian risiko yang dilakukan sesuai dengan eksposur risiko yang dihadapi dan indikator yang digunakan untuk bersifat objektif, konsisten, dan berbasis pada bukti yang jelas agar evaluasi SPIP menjadi akurat juga bisa dijadikan dasar guna perbaikan selanjutnya. Indikator kunci dalam manajemen risiko memainkan peran yang esensial dalam mendukung keberhasilan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Provinsi Kalimantan Utara. Dimulai dari penetapan konteks yang mengacu pada program OPD, proses identifikasi risiko, hingga pemetaan risiko dan penentuan prioritas, seluruh tahapan ini mendukung sistem pengendalian yang lebih transparan dan terstruktur. Dengan memanfaatkan aplikasi MARISKA, seluruh indikator dapat dikembangkan, dimonitor, dan dievaluasi secara digital dan terintegrasi, sehingga mendukung akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan berbasis pada risiko. Proses ini mengarah pada pengelolaan risiko yang tidak hanya berfungsi sebagai mitigasi ancaman, tetapi juga berpotensi sebagai alat untuk pencapaian hasil kinerja pemerintah yang lebih baik.

## **5.2 Keterbatasan Penelitian**

Penelitian ini mempunyai sejumlah batasan yang ditemukan oleh penulis, detailnya disajikan sebagai berikut:

1. Penelitian hanya difokuskan pada Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Utara, sehingga temuan belum tentu dapat digeneralisasikan ke seluruh instansi pemerintah daerah lainnya yang mungkin memiliki struktur organisasi, infrastruktur TIK, dan kesiapan SDM yang berbeda.

2. Keterbatasan jumlah dan variasi informan yang digunakan dalam penelitian merupakan pihak-pihak yang terlibat langsung dalam pengembangan atau implementasi sistem. Hal ini bisa memunculkan potensi bias, karena perspektif pengguna akhir yang mungkin pasif atau mengalami kendala belum tergali secara menyeluruh.

### 5.3 Saran Penelitian

Berdasarkan temuan penelitian ini, penulis menyarankan beberapa hal penting untuk dipertimbangkan oleh berbagai pihak terkait:

1. **Bagi instansi,** Disarankan untuk membuat program pelatihan rutin dan sertifikasi internal mengenai manajemen risiko digital dan SPIP, terutama karena adanya rotasi dan mutasi pegawai yang berpotensi mengganggu kesinambungan sistem.
2. **Bagi peneliti selanjutnya,** Disarankan untuk melakukan studi komparatif di berbagai instansi pemerintah lain agar diperoleh pemahaman yang lebih luas mengenai efektivitas model manajemen risiko digital lintas daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amirya, A., dan Irianto, G. (2024). *Risk Management in Indonesian Local Government: A Literature Study*. *JAI: Jurnal Akuntansi Integratif*, 10(1), 34-44.
- Anggraeni, D. M dan Saryono. (2013). *Metodelogi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif dalam Bidang Kesehatan*. Yogyakarta: Nuha Medika
- Arianto, Henry. (2006). *Implementasi Konsep Good Governance di Indonesia*. 3(2), 24-28.
- Ayuningtyas dan Zulfitra. (2023). *Aplikasi Manajemen Risiko SPBE berbasis Website pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik*. 13(2). 138-151
- Azmi dan Suriyadi. (2022). *Pengembangan Manajemen Resiko Pada Instansi Pendidikan*. 16(3). 543-553
- Bappeda Litbang Kalimantan Utara. (n.d.). *Berita Bappeda Litbang*. Diakses pada 27 Januari 2025, dari <https://bappedalitbang.kaltaraprov.go.id/berita/berita-bappeda-litbang/5284-rn>
- Bazeley, P dan Jackson, K. (2013). *Qualitative data analysis with NVivo* (2nd ed.). SAGE Publications.
- Bisma. (2022). *Manajemen Risiko Aset Teknologi Informasi: Studi kasus Implementasi Manajemen Risiko SPBE Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Balikpapan*. 6(2). 73-79
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed*. Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar.
- Edi, D dan Betshani, S. (2009). *Analisis Data dengan Menggunakan ERD dan Model Konseptual Data Warehouse*. *Jurnal Informatika*: 5(1).
- Farmanta. (2022). *Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pada Kantor Inspektorat Kabupaten Buton Utara Menuju Good Governance*. (3)1. 50-61
- Jonathan dan Fahrur. 2023. *Modul Penggunaan Aplikasi Manajemen Risiko Provinsi Kalimantan Utara*. Tanjung Selor: Inspektorat Daerah Kaltara
- Kementrian Keuangan RI. 2008. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.09/2008 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Departemen Keuangan.
- Kementrian Keuangan RI. 2021. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 477 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemantauan Penerapan Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Kementerian Keuangan.
- Kementrian Keuangan RI. 2022. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105 tentang Petunjuk Pelaksanaan Manajemen Risiko Pengelolaan Keuangan Negara

- Leavy, P. (2014). *The Oxford handbook of qualitative research*. Oxford University Press.
- Mawikere et al. (2022). *Evaluasi Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara*. (5)2. 1173-1182
- Miles, M. B., Huberman, A. M. and Saldana, J. (2019). *Qualitative Data Analysis*. (Fourth Edi). SAGE Publication. Ltd.
- Moleong, L. J. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Olsen, W. (2004). *Triangulation in Social Research: Qualitative and Quantitative Methods Can Really be Mixed*. Causeway Press.
- Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 57 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
- Ramdani et al. (2024). *Penerapan Manajemen Risiko Dalam Pengendalian Internal Pemerintah Di Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Bekasi*. 5(2). 3250-3255
- Risna, D. A., dan Yandari, A. D. (2022). *The Role of the Inspectorate in Conducting SPIP Coaching and Controlling to Maintain the Results of Audit Opinions (Study at the Sumenep Regency Inspectorate Office)*. Jurnal Multidisiplin Madani (MUDIMA), 2(6), 2801–2814.
- Saleh, Sirajuddin. (2017). *Analisis Data Kualitatif*. Bandung: Pustaka Ramadhan Bandung.
- Shelly, G. B., dan Rosenblatt, H. J. (2011). *Systems Analysis and Design, Ninth Edition*. Boston: Course Technology Cengage Learning.
- Strauss, A dan Corbin, J. (2013). *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan RdanD*. Alfabeta.

# LAMPIRAN

# Lampiran 1

## Surat Keterangan Penelitian



FAKULTAS  
BISNIS DAN EKONOMIKA

Gedung Prof. Dr. Ase Partadineja  
Ringroad Utara, Condong Catur, Depok  
Sleman, Yogyakarta 55283  
T. (0274) 881546, 883007, 885176;  
F. (0274) 882589  
E. feju@uii.ac.id  
W. fecon.uii.ac.id

Nomor : 351/DEK/10/PMD/III/2025  
Hal : Permohonan Ijin Penelitian

Kepada Yth.  
Kepala/pimpinan  
Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Utara  
Tanjung Selor

*Assalamu'alaikum warohmatullahi wabarokatuh*

Diberitahukan dengan hormat, bahwa setiap mahasiswa sebelum mengakhiri pendidikannya di Program Studi Akuntansi Program Magister Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, diwajibkan membuat karya ilmiah Tesis. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, mahasiswa kami:

Nama : Annisa Fitriani  
No. Mahasiswa : 23919005  
Program Studi : Program Studi Akuntansi Program Magister  
Judul Tesis : Pengembangan Model Manajemen Risiko di Era Digital  
Dalam Mendukung Sistem Pengendalian Intern Pemerintah  
(SPIP) (Studi Kasus Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan  
Utara)  
Nomer HP : 082298979807

bermaksud mohon untuk mendapatkan data/keterangan pada instansi yang Bapak/Ibu pimpin, guna penyusunan Tesis.

Adapun hasil karya ilmiah ini semata-mata bersifat dan bertujuan keilmuan. Oleh karena itu, kami mohon perkenan dan bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan ijin penelitian yang diperlukan mahasiswa tersebut.

Demikian, atas perhatian dan bantuan Bapak/Ibu, kami sampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum warohmatullahi wabarokatuh*



Prof. Johan Arifin, S.E., M.SI., Ph.D.  
NIK: 943120101

**Lampiran 2**  
**Transkrip Wawancara 1**

Narasumber : Yuniar Aspiati, SE., M.AP., CGCAE

Tanggal Wawancara : 20 Maret 2025

Jabatan : Inspektur Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Utara

No.	Pertanyaan	Jawaban
1	Dalam berbagai sektor, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sangat penting. Bagaimana tingkat perhatian Inspektorat dalam menjalankan SPIP dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara?	Dalam lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara memang belum familiar, sehingga fungsi Inspektorat saat ini terkait SPIP yaitu pengawasan secara keseluruhan pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dan amanah untuk membantu gubernur. Dalam manajemen risiko, Inspektorat sudah melaksanakan pendampingan kepada OPD sehingga OPD tersebut punya PIC untuk memitigasi atau memetakan risiko yang ada pada tiap instansi. Tetapi dalam implementasi nya masih kurang optimal.
2	Sudah berapa lama lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam pemberlakuan manajemen risiko untuk Sistem Pengendalian Intern Pemerintah?	SPIP telah diterapkan sejak lama, namun penerapan manajemen risiko mulai mendapat perhatian lebih dalam dua tahun terakhir. Hal ini didukung oleh penggunaan aplikasi MARISKA yang memfasilitasi proses manajemen risiko, serta penerbitan SK kepada masing-masing OPD yang menetapkan penanggung jawab di setiap instansi untuk memastikan pelaksanaannya berjalan optimal.
3	Bagaimana amanat dari Pemerintah Pusat kepada Inspektorat Daerah dalam Penerapan Manajemen Risiko mendukung Sistem Pengendalian Intern Pemerintah?	Manajemen risiko di tingkat provinsi melibatkan sejumlah pihak, termasuk Inspektorat dan Bappeda sebagai bagian dari tim koordinasi. Sementara itu, manajemen risiko juga

		dilaksanakan di tingkat OPD. Dalam pelaksanaannya, Inspektorat mendapat pendampingan dari BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara.
4	Apa saja tugas dan wewenang Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Utara dalam Sistem Pengendalian Intern Pemerintah?	Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Utara memiliki peran penting dalam pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Tugas dan wewenangnya mencakup pembinaan, pengawasan, serta evaluasi terhadap penerapan SPIP di seluruh perangkat daerah. Inspektorat bertanggung jawab dalam memastikan bahwa setiap OPD menjalankan pengendalian internal secara efektif melalui penyusunan dan pemantauan peta risiko, serta pelaksanaan manajemen risiko yang terintegrasi. Dengan demikian, Inspektorat berperan sebagai penggerak utama dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan bebas dari risiko yang berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan organisasi.
5	Apa saja persiapan Inspektorat Daerah dalam Penerapan Manajemen Risiko mendukung Sistem Pengendalian Intern Pemerintah agar efisien dan efektif?	Dalam penerapan manajemen risiko sebagai bagian dari upaya mendukung Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang efisien dan efektif. Inspektorat harus menyusun rencana aksi implementasi manajemen risiko yang terintegrasi dengan program pengawasan, termasuk menetapkan kebijakan dan pedoman teknis internal. Selanjutnya, Inspektorat juga perlu melakukan pemetaan risiko secara menyeluruh pada

		setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dengan mendorong masing-masing unit kerja menyusun profil risiko dan rencana mitigasinya. Selain itu, penting untuk membangun sistem pemantauan dan evaluasi risiko yang berkelanjutan agar upaya pengendalian berjalan adaptif terhadap perubahan lingkungan.
6	Apa saja rincian kegiatan manajemen risiko dalam mendukung Sistem Pengendalian Intern Pemerintah?	Selain workshop, sosialisasi, dan diklat. Saat tim auditor Inspektorat bertugas untuk melakukan pemeriksaan sekaligus melakukan penyampaian peta risiko yang ada pada OPD.
7	Bagaimana Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Utara memastikan pemahaman OPD mengenai Manajemen Risiko di Era Digital?	Meningkatkan pemahaman Aplikasi Mariska melakukan sosialisasi, selain itu saat ada pertemuan/acara kegiatan sehingga meminta waktu sebentar dalam penyampaian fungsi, manfaat dan cara kerja Aplikasi Mariska.
8	Bagaimana Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Utara menjaga agar pedoman kerja, sistem, dan prosedur Manajemen Risiko sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang berlaku?	Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Utara menjaga agar pedoman kerja, sistem, dan prosedur manajemen risiko tetap sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku melalui beberapa langkah strategis. Inspektorat secara rutin melakukan telaah dan penyesuaian terhadap regulasi terbaru, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP serta peraturan teknis lainnya yang dikeluarkan oleh BPKP selaku pembina SPIP nasional. Kedua, Inspektorat membentuk tim pengembang kebijakan internal yang bertugas menyusun dan mengkaji pedoman manajemen risiko agar selaras dengan standar nasional serta kebutuhan

		<p>lokal pemerintah daerah. Selain itu, dalam menjaga kesesuaian sistem dan prosedur, Inspektorat melaksanakan koordinasi dan konsultasi secara berkala dengan BPKP maupun lembaga terkait untuk memastikan arah kebijakan pengendalian intern dan manajemen risiko tetap relevan dan mutakhir.. Dengan pendekatan adaptif dan berbasis regulasi ini, Inspektorat Daerah dapat memastikan bahwa pelaksanaan manajemen risiko mendukung tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan berintegritas.</p>
9	<p>Laporan apa saja yang nantinya dihasilkan Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Utara dalam Sistem Pengendalian Intern Pemerintah?</p>	<p>Laporan yang dihasilkan oleh Aplikasi MARISKA terbatas pada Laporan Manajemen Risiko, yang disusun berdasarkan hasil pemetaan risiko, risk register, rencana tindak pengendalian, serta identifikasi risiko strategis. Dengan mengacu pada komponen-komponen tersebut, laporan yang dihasilkan menjadi lebih lengkap dan komprehensif.</p>
10	<p>Apa saja yang menjadi kendala dalam Penerapan Manajemen Risiko mendukung Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara?</p>	<p>Kendala eksternal yang dihadapi antara lain adalah terjadinya mutasi pegawai di lingkungan OPD. Hal ini menyebabkan pegawai yang telah ditetapkan melalui SK sebagai PIC manajemen risiko di instansinya harus digantikan apabila berpindah tugas ke instansi lain, sehingga diperlukan penyesuaian dan penunjukan personel baru. Sementara itu, dari sisi internal, tantangan yang muncul adalah seringnya terjadi perubahan regulasi dari pemerintah pusat. Namun, informasi mengenai perubahan tersebut sering kali diterima dengan lambat oleh pemerintah</p>

		provinsi maupun kabupaten/kota, sehingga berpengaruh terhadap kecepatan penyesuaian kebijakan di daerah.
--	--	--

**Lampiran 3**  
**Transkrip Wawancara 2**

Narasumber : Irfan Wihardianto, ST.,CFrA.,CRMO

Tanggal Wawancara : 20 Maret 2025

Jabatan : Kepala Sub Bagian Perencanaan & Keuangan  
Ahli Manajemen Risiko

No.	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana peran bapak sebagai Ahli bidang manajemen risiko dalam mengembangkan model Manajemen Risiko mendukung Sistem Pengendalian Intern Pemerintah?	Dalam program tersebut, beliau diberikan amanah sebagai pengawas yang bertanggung jawab melaksanakan tugas teknis terkait penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Peran ini mencakup pengawasan langsung terhadap implementasi SPIP, serta memastikan setiap tahapan berjalan sesuai dengan ketentuan dan tujuan pengendalian internal yang telah ditetapkan.
2	Kapan Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Utara mulai efektif dalam mengembangkan model Manajemen Risiko mendukung Sistem Pengendalian Intern Pemerintah?	Sebelum nya manual yaitu via excel dari BPKP, terkait dengan penilaian SPIP setiap tahun nya dengan indikator yang sama. Sehingga, dibuatnya aplikasi mariska untuk penilaian tahun-tahun berikutnya mudah karena sudah ada data sebelumnya dan juga tinggal menambahkan jika ada risiko yang baru, tidak lagi penginputan berulang secara keseluruhan.
3	Bagaimana strategi yang dilakukan dalam Penerapan Manajemen Risiko mendukung Sistem Pengendalian Intern Pemerintah?	Inspektorat merupakan evaluator dari masing-masing OPD yang ada di Lingkungan Pemerintah Kalimantan Utara. Strategi yang dilakukan dalam penerapan manajemen risiko untuk mendukung Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dilakukan secara

		bertahap dan berkelanjutan. Langkah pertama adalah dengan membangun pemahaman bersama di seluruh OPD melalui sosialisasi, workshop, dan pelatihan teknis terkait manajemen risiko. Selanjutnya, ditetapkan penanggung jawab atau PIC di setiap instansi melalui SK untuk memastikan pelaksanaan manajemen risiko berjalan secara konsisten. Pendampingan teknis juga diberikan oleh Inspektorat dengan dukungan dari BPKP Provinsi Kalimantan Utara, termasuk dalam penggunaan Aplikasi MARISKA yang memudahkan proses identifikasi, analisis, dan pemantauan risiko secara digital dan berkelanjutan. Selain itu, setiap momen pemeriksaan oleh auditor juga dimanfaatkan untuk menyampaikan peta risiko dan memberikan masukan langsung kepada OPD. Strategi ini diharapkan mampu memperkuat pengendalian internal serta meningkatkan akuntabilitas dan kinerja organisasi secara keseluruhan.
4	Apakah Pengembangan Model Manajemen Risiko di Era Digital yang di buat oleh Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Utara sudah mendukung Sistem Pengendalian Intern Pemerintah?	Penerapan manajemen risiko sudah memberikan dukungan, khususnya dalam membantu proses penyusunan risiko di setiap OPD. Meskipun demikian, tanggung jawab pengendalian tetap berada pada masing-masing OPD sesuai dengan kewenangan dan tugasnya.
5	Bagaimana antisipasi yang dilakukan Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Utara untuk mencegah risiko yang muncul karena pemberlakuan sistem digital ini?	Sebagai bentuk antisipasi, hingga saat ini Inspektorat masih terus melakukan perbaikan dan uji coba terhadap Aplikasi MARISKA selama dua tahun terakhir. Oleh karena itu,

		<p>aplikasi tersebut belum didaftarkan secara resmi ke Kementerian Kominfo. Apabila pada tahun 2025 sistem dinilai sudah stabil dan tidak memerlukan perbaikan lebih lanjut, maka perencanaan untuk rilis resmi akan segera dilakukan.</p>
6	<p>Apa saja yang menjadi kendala dalam Penerapan Manajemen Risiko mendukung Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara?</p>	<p>Kendala utama yang dihadapi adalah terkait dengan sumber daya manusia (SDM). Masih banyak pegawai yang belum memahami konsep Manajemen Risiko dan SPIP secara menyeluruh, disebabkan oleh penggunaan istilah yang dirasa terlalu kompleks dan cenderung ideal sesuai dengan panduan dari BPKP. Selain itu, jumlah bukti (evidence) yang harus disiapkan cukup banyak dan seringkali harus dikumpulkan secara berulang, sehingga menjadi beban tambahan bagi OPD.</p>
7	<p>Bagaimana proses mekanisme pengendalian internal dalam penggunaan Aplikasi Mariska?</p>	<p>Pengendalian secara teknis dalam Inspektorat yaitu dengan mengatasi problem yang muncul pada Aplikasi Mariska yang digunakan oleh OPD.</p> <p>Proses mekanisme pengendalian internal dalam penggunaan Aplikasi MARISKA dilakukan melalui beberapa tahapan yang terstruktur. Setiap permasalahan teknis yang muncul akan segera ditangani oleh tim pengembang Aplikasi MARISKA, sehingga proses pelaporan dan pemutakhiran data tetap berjalan lancar. Mekanisme ini memastikan bahwa penggunaan aplikasi selaras dengan prinsip-prinsip Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang efektif dan berkelanjutan.</p>

**Lampiran 4**  
**Transkrip Wawancara 3**

Narasumber : Soni Muhson, S.Sos., CFrA.,CRMO.,CRMP

Tanggal Wawancara : 20 Maret 2025

Jabatan : Auditor Muda

Tenaga Ahli Manajemen Risiko dan Ketua Tim Penilai  
SPIP

No.	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana tugas dan wewenang bapak sebagai Ketua Tim Penilai SPIP di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara?	Dalam tugas yaitu mengkoordinir tim penilai SPIP bisa melaksanakan dan pemenuhan setiap unsur narasi dan evidence sesuai dengan pernyataan yang ada di SPIP.
2	Apakah Pengembangan Model Manajemen Risiko di Era Digital yang di buat oleh Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Utara sudah membantu dan mendukung Sistem Pengendalian Intern Pemerintah?	Sangat membantu, karena format kertas kerja yang diberikan BPKP manual cukup ribet yaitu ada hal yang dilakukan secara berulang penginputan nya. Aplikasi mariska juga membantu melakukan monitoring terhadap capaian dari OPD.
3	Apa tujuan dan manfaat dari Aplikasi Mariska yang di buat oleh Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Utara sudah membantu dan mendukung Sistem Pengendalian Intern Pemerintah?	Membantu dan memudahkan penginputan manajemen risiko. Tugas Inspektorat melakukan pemantauan dan pendampingan manajemen risiko, dengan memastikan OPD sudah menyusun manajemen risiko.
4	Bagaimana implementasi Aplikasi Mariska dalam mendukung Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara?	Implementasi Aplikasi MARISKA telah memberikan kontribusi nyata dalam mendukung pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Aplikasi ini mempermudah proses identifikasi, analisis, dan pemantauan risiko di setiap OPD secara sistematis dan terdokumentasi. Dengan adanya fitur seperti pemetaan risiko, penyusunan risk register, rencana tindak pengendalian,

		serta pencatatan risiko strategis, MARISKA membantu memastikan bahwa manajemen risiko dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan. Selain itu, aplikasi ini juga meminimalkan penginputan data secara berulang, karena informasi yang telah tersimpan dapat diperbarui sesuai kebutuhan. Inspektorat sebagai pengelola aplikasi juga secara aktif memberikan pendampingan dan melakukan evaluasi untuk memastikan penggunaan MARISKA berjalan optimal. Dengan demikian, MARISKA menjadi salah satu alat penting dalam memperkuat efektivitas pengendalian internal di tingkat pemerintah daerah.
5	Bagaimana indikator manajemen risiko dapat mendukung Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara?	Indikator tersebut merupakan bagian dari proses yang dilakukan Inspektorat dalam menilai pelaksanaan manajemen risiko. Pada tahap awal, dilakukan identifikasi risiko yang berasal dari kegiatan operasional, dengan tujuan mengidentifikasi potensi risiko yang dapat menghambat pencapaian sasaran organisasi. Setelah risiko-risiko tersebut teridentifikasi, langkah berikutnya adalah melakukan analisis terhadap frekuensi kemunculan risiko serta tingkat dampaknya terhadap pencapaian tujuan, guna menentukan prioritas penanganan yang tepat.
6	Bagaimana proses pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia di OPD untuk meningkatkan pemahaman tentang Aplikasi Mariska?	Setiap tahunnya, dilaksanakan dua kali kegiatan sosialisasi yang berkaitan dengan manajemen risiko. Sosialisasi pertama dilakukan pada awal tahun dan difokuskan pada tahap awal penyusunan manajemen risiko oleh OPD. Sementara itu,

		<p>sosialisasi kedua dilaksanakan pada pertengahan tahun, dengan fokus pada penggunaan Aplikasi MARISKA. Kegiatan ini juga sekaligus dimanfaatkan untuk melakukan monitoring terhadap progres penginputan data manajemen risiko oleh masing-masing OPD dalam aplikasi tersebut.</p>
7	<p>Bagaimana menyikapi jika ada kesalahan yang terjadi pada Aplikasi Mariska?</p>	<p>Inspektorat telah melaksanakan langkah-langkah mitigasi terhadap potensi risiko yang mungkin timbul dalam penggunaan Aplikasi Mariska. Selain itu, Inspektorat juga secara rutin melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pihak pembuat aplikasi guna memastikan kelancaran operasional serta keberlanjutan pemeliharaan dan pengembangan sistem.</p>
8	<p>Selain manajemen risiko, apakah Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Utara juga menerapkan program lain untuk mendukung Sistem Pengendalian Intern Pemerintah?</p>	<p>Program lainnya, yaitu peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), memiliki peran strategis dalam mendukung penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Kegiatan ini saat ini masih dilaksanakan secara manual, dengan pendekatan bertahap sesuai pedoman yang berlaku, guna memastikan efektivitas pelaksanaan dan pencapaian target kapabilitas yang diharapkan..</p>
9	<p>Apa saja yang menjadi kendala dalam Penerapan Manajemen Risiko mendukung Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara?</p>	<p><b>Internal:</b> Beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) belum sepenuhnya mengintegrasikan manajemen risiko ke dalam budaya kerja mereka, karena masih dipandang sebatas sebagai kewajiban administratif atau pemenuhan dokumen semata. Oleh karena itu, Inspektorat secara konsisten melakukan</p>

		<p>upaya penyampaian dan sosialisasi secara berkala untuk menekankan pentingnya penerapan manajemen risiko dalam setiap proses kerja.</p> <p><b>Eksternal:</b> Pelaksanaan manajemen risiko cenderung terpusat pada bagian perencanaan, sehingga apabila terjadi mutasi pada pejabat atau pegawai yang sebelumnya bertanggung jawab, maka kesinambungan penerapan manajemen risiko menjadi terhambat atau berubah arah.</p>
--	--	---

**Lampiran 5**  
**Transkrip Wawancara 4**

Narasumber : Hanif Fahrur Rozi., S.Ak

Tanggal Wawancara : 20 Maret 2025

Jabatan : Auditor Pertama

User Pembuat Aplikasi Manajemen Risiko

No.	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana Penerapan Manajemen Risiko dalam mendukung Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebelum ada nya aplikasi diciptakan?	Aplikasi Mariska merupakan sebuah perangkat pendukung yang dirancang untuk membantu proses pemetaan manajemen risiko secara lebih sistematis. Aplikasi ini berbasis website, sehingga dapat diakses dengan mudah melalui peramban (browser) tanpa perlu instalasi tambahan. Dengan sistem digital ini, pengguna dapat menyusun, mengelola, dan memetakan berbagai potensi risiko secara efisien dan terorganisir. Selain itu, tampilan antarmuka yang intuitif dan fitur-fitur yang terintegrasi memungkinkan proses identifikasi, analisis, dan dokumentasi risiko dilakukan secara lebih cepat, akurat, dan terdokumentasi dengan baik.
2	Bagaimana implementasi manajemen risiko secara manual hingga beralih pada aplikasi terkait SPIP di Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara?	Sebelum hadirnya aplikasi Mariska, proses penilaian risiko dilakukan secara manual dengan mengisi lembar kerja menggunakan Excel. Oleh karena itu, dikembangkanlah aplikasi ini dengan mengadopsi alur kerja yang serupa dengan format Excel tersebut. Dengan demikian, pengguna kini dapat langsung melakukan input data ke dalam aplikasi secara digital, tanpa perlu melalui proses manual yang memakan waktu.
3	Apakah butuh waktu lama dalam menciptakan Aplikasi Manajemen	Proses pengembangan tidak memerlukan waktu yang lama

	Risiko dalam mendukung Sistem Pengendalian Intern Pemerintah?	karena sudah tersedia kerangka kerja manajemen risiko beserta alur flowchart yang jelas. Hal ini mempercepat tahapan pembuatan aplikasi, mengingat struktur dan sistem kerjanya telah terdefinisi dengan baik sejak awal.
4	Apa saja persiapan Inspektorat Daerah dalam Penerapan Manajemen Risiko di Era Digital upaya mendukung Sistem Pengendalian Intern Pemerintah agar efisien dan efektif?	SPIP merupakan kegiatan rutin yang dilakukan setiap tahun, sehingga Aplikasi Mariska dikembangkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam proses penilaiannya. Melalui aplikasi ini, proses penilaian dapat didigitalisasi, memungkinkan penyusunan dan penyimpanan kertas kerja secara lebih rapi, terstruktur, dan mudah diakses, dibandingkan dengan metode manual sebelumnya.
5	Bagaimana Inspektorat Daerah menentukan indikator utama Manajemen Risiko dalam mendukung Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)?	Indikator tersebut merupakan proses dalam inspektorat menilai manajemen risiko. Pada tahap awal identifikasi risiko menilai dari kegiatan operasional, risiko – risiko yang akan terjadi yang dapat menghambat pencapaian tujuan. Setelah risiko sudah diidentifikasi dalam tahap awal, selanjutnya risiko tersebut di analisis dengan berapa sering risiko tersebut muncul, dan seberapa besar dampaknya.
6	Apakah implementasi Aplikasi Mariska selama 2 tahun ini berjalan efektif dan efisien dalam mendukung Sistem Pengendalian Intern Pemerintah?	Aplikasi Mariska dalam 2 tahun berjalan sudah efektif dan efisien karena semua perangkat daerah berjumlah 42 sudah menggunakan Aplikasi Mariska sebagai instrumen penilaian manajemen risiko. Sehingga bentuknya tercermin dengan tidak menggunakan kertas kerja excel lagi.
7	Bagaimana sistem kerja dari Aplikasi Mariska dalam mendukung Sistem Pengendalian Intern Pemerintah?	Alur dari Aplikasi Mariska: 1. Penetapan konteks: a. Dengan mengisi rencana strategis OPD

		<p>(tahunan), dokumen yang diambil RENSTRA untuk mengisi program atau kegiatan OPD sehingga bisa ditentukan risikonya dan program tersebut mempunyai target</p> <p>b. Penyusunan risiko masing-masing kegiatan yaitu risiko operasional, risiko strategis, dan risiko fraud dan dinilai risikonya yang menghasilkan peta risiko.</p>
8	Apakah ada buku pedoman khusus dalam penggunaan Aplikasi Mariska yang dibuat oleh Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Utara?	Telah disusun sebuah buku pedoman penggunaan Aplikasi Mariska yang berfungsi sebagai panduan praktis bagi para PIC (Person in Charge) dalam menjalankan proses penginputan data. Buku ini dirancang secara sistematis dan rinci, mencakup langkah-langkah operasional, penjelasan fitur, serta alur penggunaan aplikasi. Dengan adanya pedoman ini, diharapkan para PIC dapat memahami fungsi aplikasi secara menyeluruh, sehingga proses input data menjadi lebih mudah, cepat, dan minim kesalahan.
9	Apakah data pelaporan yang ada pada Aplikasi Mariska terjamin kerahasiannya?	Laporan yang dihasilkan Aplikasi Mariska hanya Laporan Manajemen Risiko yang berdasarkan laporan pemetaan risiko, risk register, rencana tindak pengendalian, dan risiko strategis. Sehingga laporan manajemen risiko yang dihasilkan lengkap dan konferensif.
10	Apa saja yang menjadi kendala dalam Penerapan Manajemen Risiko mendukung Sistem Pengendalian	Kendala eksternal yang dihadapi adalah mutasi pegawai, yang mengharuskan penggantian PIC manajemen risiko secara berkala.

	Intern Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara?	Sementara itu, secara internal, tantangan utamanya adalah lambatnya penerimaan informasi terkait perubahan regulasi dari pemerintah pusat, yang menghambat penyesuaian kebijakan di tingkat daerah.
--	--	---

**Lampiran 6**  
**Transkrip Wawancara 5**

Narasumber : Kevin Jonathan R, S.Ak

Tanggal Wawancara : 20 Maret 2025

Jabatan : Auditor Pertama

User Pembuat Aplikasi Manajemen Risiko

No.	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana Penerapan Manajemen Risiko dalam mendukung Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebelum ada nya aplikasi diciptakan?	Sebelum adanya aplikasi, penerapan manajemen risiko dilakukan secara manual melalui identifikasi risiko pada tiap kegiatan, penilaian dampak, serta penyusunan rencana mitigasi. Meskipun sederhana, pendekatan ini telah menumbuhkan kesadaran akan pentingnya pengendalian risiko di lingkungan pemerintah.
2	Bagaimana implementasi manajemen risiko secara manual hingga beralih pada aplikasi terkait SPIP di Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara?	Implementasi secara manual menjadi fondasi yang kuat bagi transisi ke digital. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara secara bertahap mengembangkan sistem berbasis teknologi untuk meningkatkan akurasi, efisiensi, dan monitoring yang berkelanjutan, hingga akhirnya tercipta aplikasi Mariska yang mampu menyederhanakan proses manajemen risiko secara menyeluruh.
3	Apakah butuh waktu lama dalam menciptakan Aplikasi Manajemen Risiko dalam mendukung Sistem Pengendalian Intern Pemerintah?	Pembuatan aplikasi tentu memerlukan waktu, terutama untuk menyesuaikan dengan kebutuhan daerah dan memastikan kualitasnya. Namun, waktu yang digunakan sepadan dengan hasil yang dicapai, karena kini aplikasi tersebut mampu mempercepat pelaporan dan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan risiko secara baik
4	Apa saja persiapan Inspektorat Daerah dalam Penerapan Manajemen Risiko di	Inspektorat Daerah melakukan berbagai pelatihan, membentuk

	Era Digital upaya mendukung Sistem Pengendalian Intern Pemerintah agar efisien dan efektif?	tim pengembang dan pengawas, serta berkolaborasi dengan OPD terkait. Semua ini dilakukan untuk memastikan kesiapan dari sisi SDM maupun infrastruktur dalam mengadopsi teknologi secara menyeluruh.
5	Bagaimana Inspektorat Daerah menentukan 8 indikator utama Manajemen Risiko dalam mendukung Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)?	Penentuan indikator utama dilakukan dengan mempertimbangkan konteks strategis daerah, analisis risiko terdahulu, dan evaluasi kinerja. Selain itu, indikator disusun agar mampu menggambarkan area risiko yang paling berdampak terhadap pencapaian tujuan organisasi.
6	Apakah implementasi Aplikasi Mariska selama 2 tahun ini berjalan efektif dan efisien dalam mendukung Sistem Pengendalian Intern Pemerintah?	Ya, implementasi Aplikasi Mariska terbukti efektif dalam meningkatkan pelaporan risiko, mempercepat proses analisis, serta memudahkan koordinasi antar unit kerja. Efisiensi waktu dan sumber daya juga meningkat karena semua data terdokumentasi dengan baik dan bisa diakses secara real-time.
7	Bagaimana sistem kerja dari Aplikasi Mariska dalam mendukung Sistem Pengendalian Intern Pemerintah?	Aplikasi Mariska bekerja dengan cara memfasilitasi penginputan risiko, penilaian tingkat risiko, pemantauan tindak lanjut, serta penyajian laporan dalam bentuk grafik dan data yang mudah dipahami. Sistem ini terintegrasi dengan unit-unit kerja terkait untuk mendukung pengendalian internal yang komprehensif
8	Apakah ada buku pedoman khusus dalam penggunaan Aplikasi Mariska yang dibuat oleh Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Utara?	Ya, Inspektorat Daerah telah menyusun buku pedoman penggunaan aplikasi Mariska yang berisi panduan langkah demi langkah, FAQ, serta prosedur standar agar seluruh pengguna dapat mengoperasikan aplikasi dengan mudah dan konsisten.

9	Apakah data pelaporan yang ada pada Aplikasi Mariska terjamin kerahasiannya?	Tentu, keamanan data menjadi prioritas utama. Aplikasi Mariska dilengkapi dengan sistem autentikasi pengguna, enkripsi data, serta pembatasan akses berdasarkan tingkat kewenangan. Semua itu dirancang untuk menjaga kerahasiaan dan integritas informasi
10	Apa saja yang menjadi kendala dalam Penerapan Manajemen Risiko mendukung Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara?	Beberapa kendala yang dihadapi antara lain keterbatasan SDM yang memahami teknologi, infrastruktur digital yang belum merata, serta resistensi awal terhadap perubahan. Namun, melalui pelatihan berkelanjutan dan pendekatan yang inklusif, hambatan-hambatan ini secara bertahap dapat diatasi.

Lampiran 7  
Dokumentasi Wawancara

